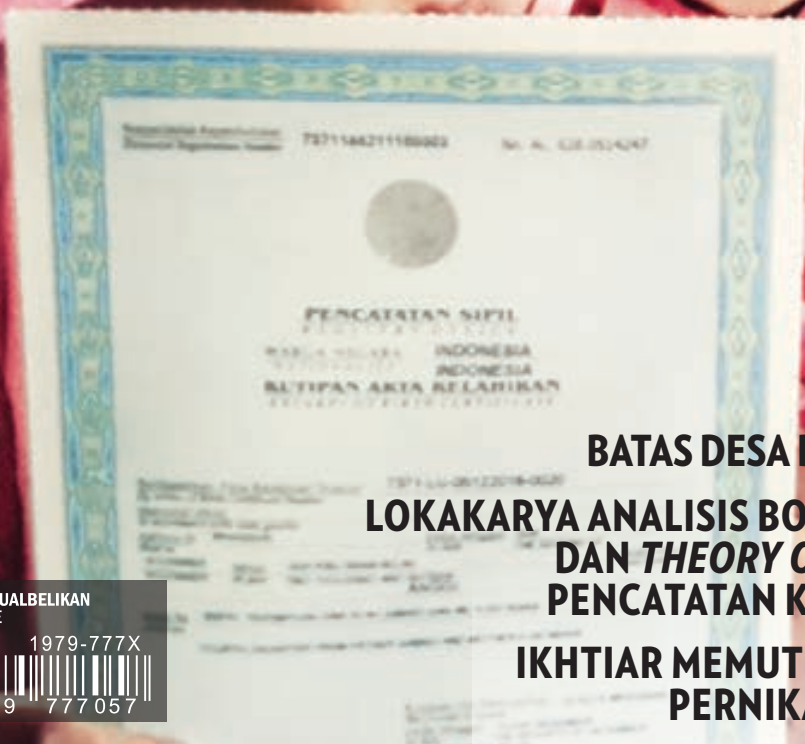


No. **142** Oktober - November 2017

BaKTINews www.bakti.or.id

No. 11 Oktober-November 2017 www.bakti.or.id
BaKTINews

MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA



BATAS DESA DI MAMUJU

LOKAKARYA ANALISIS BOTTLENECK DAN *THEORY OF CHANGE* PENCATATAN KELAHIRAN

IKHTIAR MEMUTUS RANTAI PERNIKAHAN DINI

TIDAK DIPERJUALBELIKAN
NOT FOR SALE

ISSN 1979-777X



9 771979 777057



BaKTI**News**

MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA

ISSN 1979-777X

www.bakti.or.id

Editor **M. YUSRAN LAITUPA**
VICTORIA NGANTUNG
FADHILAH MANSYUR
Suara Forum KTI **ZUSANNA GOSAL**
ITA MASITA IBNU
Events at BaKTI **SHERLY HEUMASSE**

Smart Practices
& Info Book **SUMARNI ARIANTO**
Database & Sirkulasi **A. RINI INDAYANI**
Design & Layout
Editor Foto **ICHSAN DJUNAED**

Redaksi

Jl. H.A. Mappanyukki No. 32 Makassar 90125, Sulawesi Selatan - Indonesia Telp. +62 411 832228, 833383 Fax +62 411 852146
Email info@bakti.or.id atau baktinews@bakti.or.id SMS BaKTI News 0813 4063 4999, 0815 4323 1888, 0878 4000 0201
Facebook www.facebook.com/yayasanbakti Twitter @InfoBaKTI Instagram @InfoBaKTI

BaKTI News adalah media pertukaran pengetahuan tentang pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. Tujuan BaKTI News adalah mempromosikan praktik cerdas pembangunan dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia agar dapat diketahui oleh khalayak luas dan menginspirasi pelaku pembangunan di berbagai daerah dalam upaya menjawab berbagai tantangan pembangunan. BaKTI News terbit setiap bulan dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris, untuk memudahkan pembaca dalam mendapatkan informasi pembangunan dari Kawasan Timur Indonesia.

BaKTI News disirkulasi melalui pos kepada pembaca dengan target utama adalah para pelaku pembangunan yang berdomisili di daerah kepulauan dan daerah terpencil. Tidak dikenakan biaya apapun untuk berlangganan BaKTI News agar lebih banyak masyarakat yang dapat mengakses informasi pembangunan melalui majalah ini. Selain dalam bentuk cetak, BaKTI News juga dapat diakses di website BaKTI: www.bakti.or.id dan dikirimkan melalui email kepada pelanggan yang dapat mengakses internet.

BaKTI News dikelola oleh Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI). Seluruh artikel BaKTI News adalah kontribusi sukarela para pelaku pembangunan dari berbagai kalangan dan daerah yang ingin berbagi pengetahuan dengan khalayak luas.

BaKTI News is a knowledge exchange media platform for development issues in eastern Indonesia. BaKTI News aims to promote development smart practices from different regions in eastern Indonesia so that the practices become known to a wider audience and inspire development stakeholders in other regions in their efforts to answer development challenges. BaKTI News is published monthly in two languages, Indonesian and English, to facilitate readers who don't understand Indonesian to gain a better understanding of development in eastern Indonesia.

BaKTI News is sent by post to readers and the main target is development stakeholders living in isolated regions and island regions. BaKTI News is provided free of charge so the development community can access relevant development information easily. BaKTI News is also provided in an electronic version that can be accessed on www.bakti.or.id and can be sent electronically to subscribers with internet access.

BaKTI News is managed by the Eastern Indonesia Knowledge Exchange (BaKTI). All articles are contributed voluntarily by development stakeholders from different areas in eastern Indonesia who wish to share their information with a wider audience.

BERKONTRIBUSI UNTUK BaKTI News Contributing to BaKTI News

BaKTI News menerima artikel tentang kemajuan pembangunan, pembelajaran dari suatu kegiatan, praktik cerdas pembangunan, hasil-hasil penelitian yang dapat diaplikasikan, dan teknologi tepat guna dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua).

Panjang artikel adalah 1.000 - 1.100 kata, menggunakan Bahasa Indonesia maupun Inggris, ditulis dengan gaya populer. Foto-foto penunjang artikel sangat dibutuhkan. Tim editor BaKTI News akan melakukan edit terhadap setiap artikel yang akan dimuat untuk kesesuaian tempat dan gaya bahasa. Redaksi BaKTI News tidak memberikan imbalan kepada penulis untuk setiap artikel yang dimuat.

BaKTI News accepts articles about development programs, lessons learnt from an activity, development smart practices, research results that can be applied, and applied technology from different stakeholders and regions in eastern Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, and Papua). Articles should be 1,000-1,100 words, in either Indonesian or English, and written in a popular style.

Articles should also be sent with photos that illustrate the article. The editors of BaKTI News will edit every article for reasons of space and style. BaKTI News does not provide payment to writers for articles.

MENJADI PELANGGAN BaKTI News Subscribing to BaKTI News

Untuk berlangganan BaKTI News, silahkan mengirimkan data diri anda (organisasi, posisi, nomor HP, alamat email) lengkap dengan alamat lengkap yang disertai dengan kode pos melalui email baktinews@bakti.or.id.

Bagi yang berdomisili di Makassar, Anda dapat mengambil BaKTI News di Display Corner Gedung BaKTI pada setiap hari kerja.

To subscribe to BaKTI News please send us your full contacts details (including organization, position, HP number and email address) with full postal address to baktinews@bakti.or.id.

For those living in Makassar, please stop by the BaKTI office and pick up your copy from the display corner from Monday to Friday.

Daftar Isi

BaKTI**News**

Oktober - November 2017

No. **142**

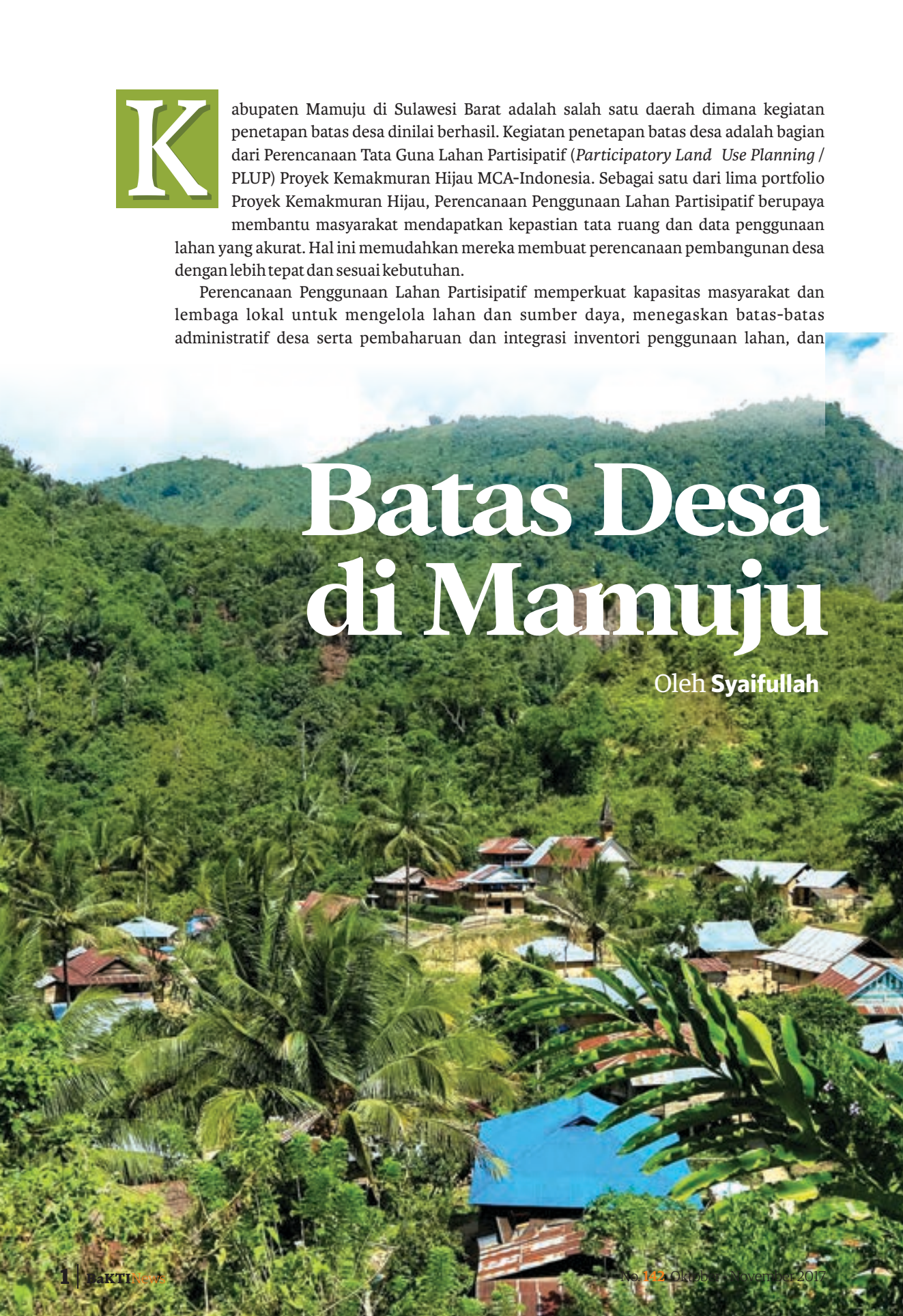
-
- | | | | |
|-----------|--|-----------|---|
| 1 | Batas Desa di Mamuju
Oleh Syaifullah | 26 | Partisipasi Konstituen Dalam
Penyusunan Perda
Oleh M. Ghufuran H. Kordi K. |
| 5 | Seberkas Cahaya Perubahan
di SD YPPK Salib Suci Agats
Oleh Fransiskus Heatubun | 29 | Ikhtiar Memutus Rantai
Pernikahan Dini
Oleh Fathul Rakhman |
| 9 | Eksotika Muna dalam
Jembatan Pensil
Oleh Yusran Darmawan | 33 | Menempuh Jalan Panjang Konservasi
Oleh Halia Asriani |
| 13 | Sistem Layanan Rujukan Terpadu
di Kabupaten Bantaeng
Oleh Arafah | 37 | KIAT Guru Siapkan Strategi
Keberlanjutan & Rintisan
Tunjangan Profesi Berbasis Kinerja |
| 15 | Lokakarya Analisis <i>Bottleneck</i>
dan <i>Theory of Change</i>
Pencatatan Kelahiran
Oleh Hamzah | 39 | Update BatukarInfo |
| 17 | Mama Sani, Perempuan Aktivis
dari Sumba Barat Daya
Oleh Syaifullah | 40 | Kegiatan BaKTI |
| 22 | Dinamika Struktur Sosial
Teluk Ambon
Oleh Gadri Ramadhan Attamimi, S.Pi | 41 | Info Buku |
- Foto Cover : **Arafah**
-
- Pulau Padar, Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur
Foto: Adhitya Rakhmat



K

abupaten Mamuju di Sulawesi Barat adalah salah satu daerah dimana kegiatan penetapan batas desa dinilai berhasil. Kegiatan penetapan batas desa adalah bagian dari Perencanaan Tata Guna Lahan Partisipatif (*Participatory Land Use Planning / PLUP*) Proyek Kemakmuran Hijau MCA-Indonesia. Sebagai satu dari lima portfolio Proyek Kemakmuran Hijau, Perencanaan Penggunaan Lahan Partisipatif berupaya membantu masyarakat mendapatkan kepastian tata ruang dan data penggunaan lahan yang akurat. Hal ini memudahkan mereka membuat perencanaan pembangunan desa dengan lebih tepat dan sesuai kebutuhan.

Perencanaan Penggunaan Lahan Partisipatif memperkuat kapasitas masyarakat dan lembaga lokal untuk mengelola lahan dan sumber daya, menegaskan batas-batas administratif desa serta pembaharuan dan integrasi inventori penggunaan lahan, dan



Batas Desa di Mamuju

Oleh **Syaifullah**

meningkatkan perencanaan ruang di tingkat kabupaten dan provinsi. Hal ini juga mengurangi berbagai risiko terkait penggunaan lahan, seperti perselisihan tanah, tumpang tindih penggunaan lahan, ketidakpastian perizinan, dan masalah-masalah lain yang dapat menghambat investasi.

Program yang berjalan sejak tahun 2016 ini dilaksanakan pada dua lokasi di Kabupaten Mamuju, yaitu Kecamatan Bonehau dan Kecamatan Kalumpang.



Kegiatan penetapan dan penegasan batas desa di Kecamatan Bonehau selesai lebih dulu, disusul kemudian dengan Kalumpang. Di kedua lokasi tersebut, batas desa yang telah diukur dan disepakati secara partisipatif. Batas desa di Bonehau dan Kalumpang kemudian telah ditetapkan dan disahkan melalui Surat Keputusan Bupati Mamuju.

“Selain Surat Keputusan Bupati, kami juga telah menyusun peta wilayah lengkap dengan koordinat yang menunjukkan patok batas desa di lapangan,” kata Budianto Muin, anggota Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa (TPPBD) Kabupaten Mamuju yang sekarang menjabat sebagai kepala Dinas Sosial Kabupaten Mamuju. TPPBD memang dibentuk untuk mengawal proses penetapan dan penegasan batas desa di Mamuju. “Hal yang terpenting adalah warga semakin sadar dan tahu betul batas wilayah desa mereka,” sambungnya.

Mengapa Batas Desa Penting?

Batas desa menjadi pilar pembangunan desa yang penting terutama sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Kewenangan Desa. Undang-Undang ini juga kerap disebut sebagai Undang-Undang Desa. Dalam Undang-Undang tersebut batas desa mutlak diperlukan untuk menjadi dasar dalam penyusunan profil desa dan tentu saja anggaran desa.

Tanpa kejelasan batas desa, perencanaan pembangunan desa tak memiliki dasar yang kuat. Batas desa yang masih belum jelas juga dapat menjadi penyebab konflik antar desa yang tidak jarang berujung pada bentrok fisik.

Usaha menetapkan dan menegaskan batas desa bukanlah hal yang mudah. Selama ini inisiatif penetapan batas desa muncul dari Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi. Hasil dari penetapan batas desa seringkali kurang mendetail sehingga meski telah dianggap selesai, masih saja ada potensi konflik yang tersisa.

Belajar dari berbagai tantangan yang dihadapi sebelumnya, Program Perencanaan Penggunaan Lahan Partisipatif MCA-Indonesia yang dilaksanakan di Kabupaten Mamuju menerapkan metode yang berbeda, yakni dengan mengedepankan partisipasi warga desa.

Masyarakat terlibat aktif dalam seluruh tahapan pelaksanaan penetapan batas desa, mulai dari pembentukan tim penetapan batas hingga diterbitkannya surat keputusan dari pimpinan daerah mengenai batas-batas desa yang telah disepakati.

“Selama ini kan, seringkali hanya aparat Pemerintah Desa yang terlibat dalam kegiatan pemetaan dan penetapan batas desa tidak begitu jelas mengenai tahapan kegiatan dan hal-hal teknis lainnya yang diperlukan dalam



pemetaan batas desa. Namun bila seluruh kegiatan disusun dan dikerjakan bersama, tahapan yang terlihat rumit pun dapat dijalani dengan baik,” kata H. M. Syahrir, Kepala Bappepan Kabupaten Mamuju. Sebelum menjabat sebagai Kepala Bappeda, H. M. Syahrir adalah Asisten I Kabupaten Mamuju sekaligus ketua Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa (TPPBD).

HM. Syahrir memuji metode partisipatif yang diterapkan oleh program PLUP. Menurutnya, metode yang melibatkan semua unsur ini benar-benar memudahkan progres penetapan dan penegasan batas desa, di samping mereduksi potensi konflik.

“Karena semua terlibat, jadi semua paham soal ini,” kata HM. Syahrir. Hasil akhir dari penetapan batas desa juga didapatkan dari hasil musyawarah, sehingga diharapkan tidak ada lagi batas desa yang bermasalah di kemudian hari.

Tantangan yang berhasil diatasi

Jalannya penetapan dan penegasan batas desa di Kabupaten Mamuju sempat menghadapi beberapa tantangan, salah satunya adalah dalam proses penetapan batas antara Kecamatan Kalumpang dan Kecamatan Mappu. Metode partisipatif yang mengedepankan musyawarah juga diterapkan dalam mengatasi tantangan ini.

Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa tampil sebagai penengah yang menjadi mediasi pertemuan antar warga dua kecamatan tersebut.

Dalam musyawarah yang dilakukan, para saksi mata bisa menunjukkan batas wilayah mereka berdasarkan aturan adat. Untungnya lagi karena batas yang diributkan itu tidak memiliki potensi ekonomi yang tinggi yang kerap melahirkan sengketa berkepanjangan dua pihak. Mediasi yang dilakukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa dianggap berhasil karena sengketa batas dapat selesai tanpa menimbulkan konflik.

“Salah satu faktor pendukung keberhasilan penentuan batas desa di dua kecamatan tersebut adalah banyaknya saksi sejarah yang masih hidup,” ujar H. M. Syahrir. Menurutnya para saksi juga terlibat dalam tim teknis bernama Tim Pelaksana Desa (TPD) sehingga proses penentuan batas jauh lebih lancar.

Tantangan lain yang dihadapi dalam proses penetapan dan penegasan batas desa adalah mutasi dalam struktur pemerintahan. Setelah sukses di Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju, Pemerintah Kecamatan Tommo' juga tertarik untuk mereplikasi metode penetapan batas desa. Hanya saja, tak lama setelah ide replikasi tersebut digulirkan kepada Kepala Desa dalam wilayahnya untuk menganggarkan



Foto Dok. Yayasan BaKTI/Syaifulah

program pemetaan dan penetapan batas desa secara partisipatif, Camat Tommo' dipindahkan tugas.

Permasalahan serupa juga terjadi pada komposisi anggota Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Keanggotaan dalam tim ini adalah berdasarkan pada jabatan. Akibatnya bila terjadi mutasi dalam tubuh pemerintah daerah, maka individu yang sebelumnya menjadi anggota tim secara otomatis mengalami pergantian.

Individu yang baru masuk menjadi anggota TPPBD memerlukan waktu untuk menyerap informasi baru dan mempelajari tahapan demi tahapan serta faktor-faktor penentu keberhasilan setiap tahapan penetapan dan penegasan batas desa. Bila pergantian anggota terjadi dalam masa penetapan dan penegasan batas desa maka terkadang tim memerlukan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan tahapan yang sedang berjalan. Hal ini tentu saja dapat mempengaruhi lamanya waktu yang diperlukan untuk mencapai tujuan akhir, yaitu penetapan maupun penegasan batas desa.

Mereplikasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa

Penetapan batas desa dapat menjadi sebuah instrumen penting bagi pemerintah untuk mendorong pembangunan di desa. "Penetapan

batas desa seperti ini sudah selayaknya dipandang oleh pemerintah pusat sebagai sebuah elemen yang strategis," kata Muhammad Fauzan, mantan anggota Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang kini mengabdikan di Perpustakaan Daerah Mamuju. Menurut penghitungannya, tiap desa dapat menganggarkan sekitar 30 juta rupiah untuk penentuan batas desa sebelum mencapai ke penegasan batas desa. Anggaran tersebut dapat digunakan untuk menetapkan batas desa dengan metode partisipatif.

Hal yang sama juga diutarakan oleh H. M. Syahrir. Menurutnya, replikasi metoda penetapan dan penegasan batas desa secara partisipatif sebagaimana telah dilakukan melalui program Perencanaan Penggunaan Lahan

Partisipatif ini sangat dimungkinkan.

"Replikasi metode partisipatif dalam penetapan batas desa tentu saja sangat dimungkinkan dengan menggunakan anggaran desa," ujar H. M. Syahrir. Ia juga menambahkan bahwa penganggaran kegiatan penentuan batas desa secara partisipatif juga bisa ditanggung bersama. Sebagian dana dapat menggunakan dana desa, sebagian lagi ditanggung oleh kabupaten. Pemerintah Kabupaten pun menurut dapat menghubungkan pihak desa dengan pihak lain yang juga berperan dalam kegiatan pemetaan ini, seperti Badan Informasi Geospasial (BIG).

Senada dengan Muhammad Fauzan, H. M. Syahrir pun mengharapkan kegiatan penetapan dan penegasan batas desa dengan metoda partisipatif sebagaimana telah berhasil dilaksanakan melalui Program Perencanaan Penggunaan Lahan Partisipatif yang didukung MCA-Indonesia ini dapat menjadi prioritas nasional. Pemerintah Mamuju telah merasakan betul manfaat dari kegiatan penetapan batas desa yang menggunakan metode partisipatif. Penting bila program yang sudah berjalan dengan baik ini juga dapat direplikasi di tempat lain.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Informasi lebih jauh tentang Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Pengetahuan Hijau di Indonesia, silakan menghubungi email: info@bakti.or.id



Seberkas Cahaya Perubahan di SD YPPK Salib Suci Agats

Oleh **Fransiskus Heatubun**

"Kami menyampaikan terima kasih kepada LANDASAN Papua yang sudah membantu kami dalam mempersiapkan akreditasi sekolah. Saat ini, kami sudah bentuk tim delapan standar akreditasi. Masing-masing tim sedang menyiapkan dokumen akreditasi. Kami juga siap menjadi Sekolah Dasar Penggerak di Kabupaten Asmat,"

Fransiskus Heatubun

Kepala SD YPPK Salib Suci Agats,

S

ekolah Dasar YPPK Salib Suci Agats terletak di tengah kota Agats. Sekolah ini didirikan sepuluh tahun silam oleh Yayasan Pendidikan dan

Persekolahan Katolik (YPPK) Yan Smit Keuskupan Agats. Letaknya seratus meter di depan gereja Katedral Salib Suci Agats. Meskipun berada di tengah kota Agats dan tidak jauh dari Kantor Keuskupan Agats, tetapi sarana-prasarana dan keadaan tata kelolanya memprihatinkan.

Halaman sekolah tampak gersang. Tanah di lingkungan sekolah dibiarkan kosong. Demikian halnya, di depan kelas tidak tampak pot bunga. Sampah berserakan di halaman sekolah.

Sekolah ini memiliki tiga ratus murid. Ratusan siswa ini rela mengantri ke toilet. Hanya ada dua toilet siswa yang berfungsi. Di depan sekolah berdiri papan nama yang sudah usang sehingga tulisannya hampir tidak terbaca. Demikian halnya, Perpustakaan tidak berfungsi. Buku-buku tua tergelatak di rak-rak buku. Meskipun berstatus sekolah Katolik, sekolah ini minim sarana rohani. Di sekolah ini belum ada ruang doa.

Dari sisi tata kelola, para guru yang mengajar di SD YPPK Salib Suci Agats belum membiasakan diri menggunakan Rencana Proses Pembelajaran (RPP). Guru masuk ke kelas dan mengajar tanpa RPP. Situasi ini terjadi karena dokumen kurikulum belum tersedia. Selain itu, komite sekolah tidak berfungsi. Komite sekolah dibentuk sekedar legalitas pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Seutas doa dipanjatkan oleh Frans. "Saya berdoa minta Tuhan membuka jalan supaya kami bisa membenahi sekolah ini," ungkapnya saat ditemui staf LANDASAN Maret 2017. Melalui perjumpaan dengan Landasan Papua niat Frans untuk membenahi SD YPPK Salib Suci Agats menemukan jalannya.

Pada tanggal 23 Mei-1 Juni 2017, LANDASAN Papua menggelar pelatihan SPM dan MBS bagi para guru di Distrik Agats. Pelatihan ini menjadi momentum Frans menata sekolahnya. Ia hadir

selama delapan hari tanpa alpa bersama guru senior, Bibiana Lestari dan operator sekolah, Wendi Heatubun. Usai mengikuti pelatihan ini, Frans langsung memimpin para gurunya untuk membenahi SD YPPK Salib Suci Agats

Cahaya Perubahan

Frans memiliki komitmen membenahi SD YPPK Salib Suci Agats. Setelah mengikuti pelatihan SPM dan MBS Mei silam. Ia langsung membentuk tim delapan standar akreditasi sekolah. "Setelah pelatihan SPM dan MBS, saya langsung bentuk tim untuk persiapan akreditasi sekolah. Selain itu, waktu rapat orang tua pada akhir tahun pelajaran 2016/2017, kami langsung membantu komite sekolah," tutur Frans bersemangat.

Tifa perubahan yang ditabuh Frans kini mulai tampak dan dirasakan oleh peserta didik dan warga kota Agats. Halaman SD YPPK Salib Suci tampak bersih dan terawat. Sampah tidak bertebaran. Area kosong telah ditanami pohon. Di depan kelas sudah ada pot bunga dicat hijau. Bunga bertumbuh, hijau dan segar. "Saya minta anak-anak bawa pot bunga. Kami atur dengan rapi di depan kelas sana," tuturnya sambil menunjuk ke arah pot yang berjejer di depan salah satu ruang kelas.

Frans juga membangun empat toilet siswa, papan nama sekolah dan gugus depan Pramuka, ruang doa, lemari delapan standar akreditasi dan kantin sekolah. "Kami gunakan dana seadanya untuk melengkapi kekurangan di sekolah ini. Yayasan tidak banyak membantu karena keterbatasan dana. Karena itu, kami hanya mengandalkan dana BOS," ujar pria yang sejak tahun 1983 sudah mengajar di Asmat ini.

Selain itu, saat ini para guru mulai menggunakan RPP saat mengajar. Frans selalu mengontrol para guru untuk setia menyediakan RPP. Setiap akhir pekan dilakukan evaluasi untuk mengecek kesiapan SD YPPK Salib Suci menghadapi akreditasi sekolah. Para guru semakin aktif mengajar.

Perubahan tata kelola dan pembenahan di SD YPPK Salib Suci Agats tidak semudah membalikkan telapak tangan. “Saya berusaha meyakinkan para guru untuk bekerja sama membangun sekolah ini. Saya berkomitmen meletakkan dasar penyelenggaraan pendidikan berkualitas di sekolah ini. Karena itu, saya akan berusaha sampai sekolah ini benar-benar memenuhi standar akreditasi,” tutur Frans bersemangat.

Sementara itu, salah satu guru senior, Bibiana Lestari mengungkapkan bahwa sampai saat ini dirinya berusaha supaya Perpustakaan bisa dibuka sehingga dapat digunakan oleh anak-anak. “Saya sudah mulai menata Perpustakaan. Saya berharap anak-anak akan senang menggunakan Perpustakaan di sekolah ini,” tutur guru yang tiba di Agats pada tahun 2003 silam ini. Ia menambahkan ke depan perlu ada penambahan buku bacaan dan pembuatan kartu Perpustakaan. “Kami akan upayakan penambahan buku bacaan dan penerbitan kartu Perpustakaan untuk para siswa.”

Di sisi lain, kesulitan dana menjadi tantangan pengelolaan SD YPPK Salib Suci Agats. “Selama ini kami terkendala dana untuk membenahi sekolah ini. Yayasan kurang memberikan kontribusi. Sedangkan orang tua siswa juga tidak banyak membantu. Kami hanya mengandalkan dana BOS,” ungkap Wendi Heatubun, guru operator SD YPPK Salib Suci, Agats. Ia mengatakan bahwa dirinya berusaha membantu Kepala Sekolah membenahi perbaikan SD YPPK Salib Suci supaya menjadi sekolah dasar Penggerak. “Saya membantu kepala sekolah membuat SK Komite Sekolah, laporan pengelolaan dana BOS dan data siswa,” tambahnya.

Keberhasilan SD YPPK Salib Suci Agats dalam memperbaiki tata kelola sekolah mendapat perhatian dari Kepala



UPTD Pendidikan Distrik Agats, Damaskus Karubun. Ia menegaskan bahwa proses perbaikan tata kelola di SD YPPK Salib Suci patut diapresiasi, sekaligus perlu didampingi terus-menerus sehingga bisa menjadi sekolah dasar Penggerak di Kabupaten Asmat. “Kepala sekolah harus membangun komunikasi dengan semua stake holder supaya sama-sama memperhatikan SD YPPK Salib Suci Agats,” tuturnya.

Setelah melewati proses perbaikan tata kelola, pada tanggal 5 September 2017 Bupati Asmat, Elisa Kambu meresmikan SD YPPK Salib Suci Agats bersama dua sekolah lainnya, SD Inpres Syuru dan SD Darussalam menjadi sekolah dasar Penggerak di Kabupaten Asmat. Kerja keras Frans bersama para gurunya telah membuahkan perbaikan nyata di SD



Selama ini kami terkendala dana untuk membenahi sekolah ini. Yayasan kurang memberikan kontribusi. Sedangkan orang tua siswa juga tidak banyak membantu. Kami hanya mengandalkan dana BOS

Wendi Heatubun

Guru operator SD YPPK Salib Suci, Agats

YPPK Salib Suci, Agats. Kini, para para murid bisa belajar dengan tenang, menikmati taman kelas yang indah dan tidak lagi mengantri di depan toilet.

Seberkas cahaya perubahan telah terbit di SD YPPK Salib Suci Agats. Para guru yang dipimpin oleh Frans telah menabuh tifa perubahan ke arah perbaikan tata kelola SD YPPK Salib Suci Agats. Harapannya, ke depan SD YPPK Salib Suci Agats bisa memancarkan cahayanya ke seluruh tanah Asmat, menggerakkan sekolah dasar lainnya untuk berbenah. Dengan demikian, anak-anak Asmat bisa memperoleh pendidikan dasar berkualitas demi masa depan Asmat yang maju dan sejahtera.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Informasi lebih jauh tentang Program LANDASAN Fase II, silakan menghubungi email: info@bakti.or.id



Eksotika Muna dalam Jembatan Pensil

Oleh **Yusran Darmawan**

Kisah tentang pendidikan untuk anak-anak di pelosok tanah air ibarat mata air yang tak kunjung habis untuk digali. Setelah beberapa waktu lalu film *Laskar Pelangi* yang menampilkan kisah anak-anak Belitung hadir di layar kaca dan mencatatkan dirinya sebagai film terlaris, kini film *Jembatan Pensil* yang mengisahkan anak-anak sekolah di Pulau Muna, Sulawesi Tenggara, tayang di bioskop.

Film ini mengisahkan lima anak yang belajar di pulau kecil dalam kondisi serba terbatas. Kelima anak itu adalah Inal, Yanti, Nia, Aska, dan Ondeng. Di antara mereka, Inal memiliki keterbatasan penglihatan sehingga membutuhkan bantuan temannya. Sedangkan Ondeng adalah anak yang berkebutuhan khusus. Secara fisik, Ondeng adalah orang dewasa, tapi secara mental dia masih kanak-kanak.

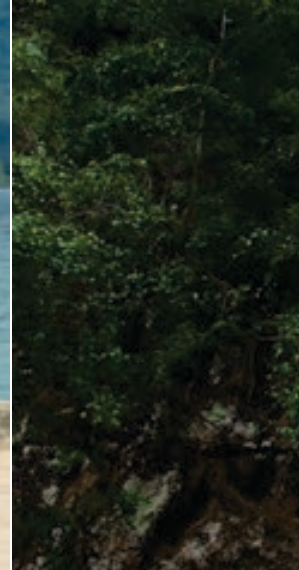


Kelimana belajar di sekolah gratis yang gurunya hanya seorang. Demi menjangkau sekolahnya, anak-anak itu setiap hari berjalan di hutan, lalu meniti di jembatan yang sangat rapuh. Mereka harus menghadapi risiko setiap saat bisa jatuh di jembatan dan terseret arus. Di tengah kesulitan tersebut, kelimana tetap punya mimpi dan obsesi untuk tetap bersekolah.

Di sisi lain, ada pula cerita seorang perempuan yang kembali dari kampung halaman demi menggantikan ayahnya sebagai guru. Ada juga nelayan senior dan nelayan junior yang sama-sama melaut, serta punya pertalian darah dengan anak berkebutuhan khusus. Juga beberapa figuran yang meramalkan film yang berlatar di Pulau Muna ini.

Sebagai warga Sulawesi Tenggara, film ini adalah nostalgia melihat kampung halaman sendiri. Saya senang melihat gambar-gambar cantik tentang lanskap Pulau Muna yang memiliki pantai-pantai berpasir putih, pulau-pulau yang sama indahnya dengan Raja Ampat, juga sekolah kecil di pesisir laut. Film ini serupa jendela bagi masyarakat luar untuk mengenali betapa banyaknya tempat-tempat indah di tanah air yang perlu dikunjungi.

Tak sekadar menampilkan pantai dan pulau, aspek budaya yang ditampilkan di sini adalah layang-layang kaghati, yang diyakini sebagai layang-layang tertua di dunia. Kaghati pertama diketahui dari lukisan yang ada di dinding Gua



Sugi Patani, yang diperkirakan berasal dari masa 9.000-5.000 SM. Lukisan gua tentang layang-layang ini adalah rekaman data sejarah paling tua tentang layang-layang.

Penanda budaya lain yang ditampilkan adalah gua-gua masa prasejarah yang menampilkan lukisan manusia zaman purba. Kesemuanya membentuk satu lanskap kebudayaan Muna sebagai warisan budaya yang harus dilestarikan.

Dua Catatan

Sebagai orang yang tinggal tak jauh dari Pulau Muna, punya banyak keluarga dan sahabat, serta amat sering berkunjung ke pulau itu, saya merasakan ada beberapa hal yang cukup mengganggu dalam film ini.

Pertama, saya melihat jalan ceritanya hampir sama dengan Laskar Pelangi. Ada cerita tentang anak-anak, guru yang berdedikasi, hingga perempuan yang memilih jadi guru di sekolah terpencil. Yang membedakan hanyalah lokasi dan beberapa variasi cerita. Misalnya, jika lokasinya di Raja Ampat ataupun Kalimantan, kisahnya akan mengalir seperti biasa.

Yang baru dari kisah Jembatan Pensil adalah hadirnya sosok anak berkebutuhan khusus yang kemudian menjadi jantung dari cerita ini. Anak itu paling peduli pada teman-temannya dan terobsesi untuk membuat jembatan agar dilewati temannya. Sayangnya, beberapa gambar dibuat tanpa perencanaan matang. Aneh saja melihat seorang anak nelayan berkebutuhan khusus itu tewas karena sengaja ke laut lalu tenggelam di lautan yang teduh dan tanpa riak. Sepengetahuan saya, para nelayan justru makin piawai saat menghadapi arus dan gelombang.

Andaikan pembuat film ini sedikit melakukan riset, pastilah akan menemukan fakta-fakta menarik di masyarakat. Banyak kisah yang bisa dieksplor. Setiap anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, menjadi tanggung jawab komunitas. Masyarakat menerima dan memperlakukan mereka sebagaimana anak lain, sesuatu yang berbeda dengan kenyataan di kota-kota.

Skenario film ini terasa kurang greget. Pengambilan gambar-gambar serupa sinetron. Lebih banyak zoom in. Peran aktornya juga tidak maksimal. Rasanya aneh saat melihat ada seorang nelayan dan juga seorang peternak dengan wajah semulus bintang sinetron, serta berbicara dalam aksen Jakarta. Apakah wajah nelayan itu tak pernah dipanggang oleh terik matahari dan asinnya air laut sampai-sampai terkesan seperti baru keluar dari salon?

Jika film ini diniatkan untuk menghadirkan menu yang baru, maka harusnya kisah dan skenario dibuat dengan matang, yang bisa mengeksplorasi khazanah lokal dengan baik. Menyajikan sesuatu yang sudah pernah dibuat terasa seperti menyodorkan menu yang sama pada orang-orang yang sudah pernah menikmatinya.

Kedua, tak semua pemainnya bisa menampilkan aksen dan cara berbicara yang khas Muna. Mungkin ini disebabkan oleh para aktornya yang kebanyakan berasal dari Jakarta. Padahal, jika menggunakan pemeran warga lokal, pasti nuansa lokalnya akan lebih kuat. Dalam film ini, semua anak-anak sekolah berbicara dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Padahal kesehariannya belum tentu



Sumber foto: jembatanpensil.com

demikian. Aksen lokal adalah hal yang tak mungkin dihindarkan.

Bahasa dan aksen adalah penanda budaya penting di setiap komunitas. Melalui bahasa dan aksen, kita bisa merasakan detak jantung setiap kebudayaan. Kita mengalami keragaman budaya dan kekuatan karakter masyarakat melalui ikhtiar mereka untuk mempertahankan bahasa dan aksen. Belakangan ini, beberapa film bertema lokal di Makassar, di antaranya adalah *Uang Panai* dan *Silariang*, sukses menjadi tontonan wajib karena kemampuan untuk menampilkan kekhasan lokalitasnya, dan tidak sekadar mengikuti wacana Jakarta.

Peran aktor dari Jakarta ini bisa dipahami. Mungkin mereka dihadirkan agar film ini memiliki nilai jual yang tinggi. Nama seperti Meriam Bellina masih punya magnet kuat di tanah air.

Akan sangat baik jika aktor-aktor Jakarta itu bersinergi dengan para aktor lokal yang juga hadir dalam porsi penting. Kombinasi antara Cut Mini Theo dan anak-anak Belitung bisa menjadi pelajaran baik tentang bagaimana mengombinasikan aktor luar dan aktor setempat sehingga tampilan filmnya ciamik.

Satu-satunya pemain yang bisa menampilkan aksen Muna secara natural adalah bapak juragan ternak. Pemainnya ini adalah warga asli Muna. Makanya, aksen bicaranya sangat natural dan tidak dibuat-buat. Beberapa teman saya asal Muna yang sama-sama menyaksikan film ini selalu tertawa terbahak-bahak saat bapak itu berbicara. Penonton terhibur oleh penampilan aktor ini.

Ke depannya, riset film-film bernuansa lokal harus dimatangkan sehingga problem yang dihadirkan adalah problem yang sehari-hari

dirasakan warga sekitar. Riset juga harus dilakukan untuk mengetahui cara bertutur, topik-topik perbincangan di masyarakat, serta apa saja keunikan semua wilayah. Riset naskah penting untuk menghadirkan film bermutu, yang tak hanya bisa menjadi ajang promosi untuk mengangkat potensi daerah, melainkan bisa pula memperkaya khasanah pengetahuan masyarakat tentang satu daerah.

Apapun itu, film *Jembatan Pensil* ini sukses mengobati rasa penasaran untuk menyaksikan sudut-sudut indah Pulau Muna. Film ini menjadi media promosi yang tepat sehingga Indonesia bisa mengenali mutiara indah yang selama ini terpendam. Dengan publikasi yang intens, film ini bisa menjadi ajang promosi Pulau Muna yang saat ini mulai disentuh pemerintah daerahnya.

Scene paling saya sukai adalah lanskap danau air asin Napabale yang diambil dari atas. Gambarnya terlihat sangat alami berupa laut biru kehijauan, air tenang, serta tebing-tebing batu menjulang. Gambar itu diambil dengan menggunakan *drone*. Lokasi menarik yang memorable adalah Pantai Towea, Gua Liangkabori, dan permandian air tawar Sangia. Melihat *scene* menarik ini, semerbak rindu pada Pulau Muna, yang digambarkan dalam syair: "*newatumo kalembohana reangku*." Di situlah tumpah darahnya.

Jika pemerintah jeli, maka lokasi syuting, termasuk bangunan sekolah dasar di Pulau Towea yang sederhana itu, akan dipertahankan agar kelak menjadi obyek wisata sebagaimana bangunan SD Gantong di Belitung yang menjadi tempat pengambilan gambar film *Laskar Pelangi*. Suatu saat, pengunjung Pantai Towea akan berpose di dekat bangunan sekolah dasar itu sembari mengenang film *Jembatan Pensil*.

Di balik segala kelebihan dan kekurangannya, film *Jembatan Pensil* menampilkan mutiara indah di Pulau Muna, Sulawesi Tenggara. Tertarik ke sana? Yuk.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Tulisan ini juga dapat dibaca pada link berikut

<http://www.timur-angin.com/2017/09/eksotika-muna-dalam-jembatan-pensil.html>

Sistem Layanan Rujukan Terpadu di Kabupaten Bantaeng

Oleh **Arafah**

Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) merupakan sistem yang membantu masyarakat dan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan.

Pada tahun 2015 Kabupaten Bantaeng dijadikan percontohan pelaksanaan Sistem Layanan Rujukan Terpadu dalam menjamin penjangkauan terhadap warga miskin dalam mendapatkan layanan Pemerintah Pusat bersama dengan 5 kabupaten/kota lainnya (Sragen, Sleman, Sukabumi dan Belitung Timur). SLRT masuk dalam RPJMN Tahun 2015-2019 sehingga menguatkan perlunya sebuah sistem dalam penjangkauan terhadap warga miskin oleh pemerintah.

Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan, saat ini telah berhasil mengembangkan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu. Keberhasilan ini menjadikan Kabupaten Bantaeng sebagai salah satu tempat kunjungan belajar terkait layanan rujukan terpadu oleh beberapa daerah lain termasuk Kota Makassar dan Kabupaten Gowa.

Saat ini Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integratif (PPKAI) Kota Makassar maupun PPKAI Kabupaten Gowa sedang mengembangkan uji coba layanan anak integratif, namun belum banyak perkembangan dan perubahan yang signifikan dalam hal penjangkauan data dan layanan. Oleh sebab itu, UNICEF melalui Yayasan BaKTI bersama pemerintah setempat memberikan dukungan bagi Pengelola PPKAI, Dinas Sosial, Bappeda, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar dan Kabupaten Gowa untuk melakukan kunjungan belajar tentang penerapan SLRT dan kerjasama lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bantaeng dalam melakukan rujukan dan layanan.

Pada tanggal 5 September 2017, perjalanan menuju Kabupaten Bantaeng. Diskusi dan kunjungan dilakukan pada tanggal 6 September 2017. Kunjungan belajar diikuti oleh 12 orang (laki-laki 7 orang dan perempuan 5 orang) dari Kota Makassar dan Kabupaten Gowa, 4 orang Tim UNICEF dan 2 orang tim BaKTI. Tujuan kegiatan ini untuk mempelajari



pengembangan lebih lanjut di PPKAI wilayah masing masing. Model Pengembangan SLRT yang diselaraskan dengan PPKAI di wilayah masing-masing. Para peserta diterima dan disambut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng Andi Irvandi Langgara, AP.

Pengantar dan gambaran singkat SLRT di Kabupaten Bantaeng, presentasi ini disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng, dilanjutkan dengan diskusi Strategi Penerapan SLRT, hasil/dampak, dan tantangan penerapannya dari perspektif pemberi layanan dan penerima layanan. Peserta melakukan kunjungan ke SLRT melihat langsung proses pelayanan dan rujukan yang dilakukan oleh SLRT Bantaeng. Selama proses diskusi, hadir pula peserta lokal sebanyak 14 orang (laki-laki 5 orang dan perempuan 9 orang) yang berasal dari OPD terkait; Bappeda, Dinas Sosial, Dinas PMD, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Diskudcapil, TKPKD, Baznas,

RSUD Prof. Anwar Makkatutu Bantaeng dan Tim SLRT Bantaeng.

Dari kunjungan ini, tim dari Kota Makassar dan Kabupaten Gowa saling berbagi pengetahuan dan pengalaman terkait pengelolaan layanan terpadu. Pemerintah Kabupaten Bantaeng juga menyampaikan berbagai pengalaman dan tips dalam mengelola Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) sehingga layanan yang ada dapat berjalan maksimal seperti saat ini. Kondisi SLRT Kabupaten Bantaeng sebelumnya mengalami hambatan dan tantangan. Namun, dengan adanya kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Sosial dengan OPD lainnya, layanan ini dapat terwujud dan berjalan dengan baik.

Dari kunjungan ini, tim dari Kota Makassar dan Kabupaten Gowa diminta menyusun Rencana Tindak Lanjut sebagai bagian dari agenda kunjungan belajar. RTL ini diharapkan mampu diimplementasikan di wilayah masing-masing.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Program ini. Hubungi kami melalui email info@bakti.or.id

Lokakarya Analisis *Bottleneck* dan *Theory of Change* Pencatatan Kelahiran

Oleh **Hamzah**

Akta kelahiran adalah salah satu hak hidup anak yang dijamin oleh negara. Akta ini memuat catatan autentik dan diakui tentang waktu dan tempat kelahiran anak, nama anak, nama orang tua anak secara lengkap, dan status kewarganegaraan anak. Jika seorang anak tidak memiliki akta ini maka ia akan kehilangan hak kesejahteraan sosial seperti jaminan pendidikan, kesehatan, kependudukan, perlindungan, dan lain-lain. Oleh karena itu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, terus berupaya mempercepat pemberian akta kelahiran kepada setiap anak yang baru lahir.

UNICEF bersama Yayasan BaKTI sedang memfasilitasi pemerintah kota Makassar dan kabupaten Gowa untuk mewujudkan tercapainya 100% kepemilikan akta kelahiran anak. Upaya ini merujuk pada Permendagri Nomor 9 tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. Juga guna mendukung komitmen RPJMN 2015 – 2019 tentang pencatatan kelahiran anak dengan prioritas nasional mencapai target minimal 85% anak memiliki akta kelahiran pada tahun 2019.

Hingga Agustus 2017, khususnya di kota Makassar capaian cakupan kepemilikan akta kelahiran mengalami peningkatan. Meskipun menurut Kepala Dinas Dukcapil, Nielma Palamba, SH.M.A.P., pihaknya masih menghadapi sejumlah hambatan dan tantangan. Seperti yang ia sajikan, Makassar saat ini

mencapai 64% dari 496.708 anak usia 0-18 tahun dan 87.37% dari 133.038 anak usia 0-5 tahun. Sementara di Gowa menurut Ambo, SH., MH, Kepala Dinas Dukcapil, cakupan kepemilikan akta kelahiran baru mencapai 52.32% dari 248.029 anak usia-0-18 tahun. Hambatan dan tantangan yang harus diselesaikan juga masih banyak.

Tahun 2019 kota Makassar dan kabupaten Gowa menargetkan 95% dan 90% capaian cakupan kepemilikan akta kelahiran. Untuk mencapai target tersebut mereka menghadapi berbagai macam masalah dan hambatan (*bottleneck*). Oleh karena itu, UNICEF bersama Yayasan BaKTI menggelar Lokakarya Analisis Hambatan dan *Theory of Change* dalam pencatatan kelahiran di kota Makassar dan kabupaten Gowa, pada tanggal 7-8 September di Hotel Aston Makassar.

Bottleneck Analysis dan *theory of change* dalam pencatatan kelahiran adalah cara untuk mengekstraksi lalu mengurai secara rinci seluruh masalah dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Dukcapil dan mitranya dalam melakukan pencatatan kelahiran. *Theory of change* itu sendiri membantu menentukan langkah, strategi dan jalur perubahan dari setiap jenis hambatan pencatatan kelahiran yang teridentifikasi.

Peserta yang terlibat sebanyak 67 orang (35 perempuan dan 32 laki-laki), 38 berasal dari Kota Makassar dan 29 dari Kabupaten Gowa. Mereka berasal dari Dinas Dukcapil, Dinas



Foto: Dok. Yayasan BaKTI

Sosial, Dinas P3A, Dinas Kesehatan, Kemenag, KUA, rumah sakit, Puskesmas, pemerintah kecamatan, TSKS Kecamatan, Lurah, LPM kelurahan, SLRT, tim Peksos, tim PKH, kader KB, LPA, dan LSM aktifis perlindungan anak lainnya. Lokakarya ini bertujuan untuk memfasilitasi mereka menelisik beragam isu yang menjadi penghambat pencatatan kelahiran.

Selama dua hari peserta fokus menganalisis empat area determinan pencatatan kelahiran yakni, Penyedia Layanan, Pengguna Layanan (demand), Kualitas Layanan, dan Lingkungan Pendukung. Isu penting yang pertama mereka elaborasi adalah menemukan karakteristik kelompok penduduk dengan anak yang rentan, serta masalah dan penyebab mereka tidak memiliki akta kelahiran. Setelah itu semua temuan diklasifikasikan ke dalam empat area determinan tersebut dan selanjutnya mereka tentukan strategi dan jalur perubahan (metode, pendekatan dan model layanan) yang mengatasi setiap hambatan pencatatan kelahiran.

Hasil Lokakarya

Peserta dari Makassar dan Gowa telah mendapatkan pengalaman penguatan kapasitas dalam hal praktik menganalisis hambatan pencatatan kelahiran dengan menggunakan metode dan pendekatan *theory of change*.

Hasilnya, mereka telah merumuskan kajian *bottleneck*, rencana aksi, dan rencana tindak lanjut.

Peserta Makassar merumuskan Rencana Aksi dan Rencana Tindak Lanjut yang mendukung pencapaian target 95% kepemilikan akta kelahiran bagi anak usia 0-18 tahun termasuk dari keluarga rentan pada tahun 2019. RTL yang disusun mencakup 23 kegiatan prioritas dan mendesak dalam lingkup Penyedia dan Pengguna layanan serta Lingkungan Pendukung.

Peserta dari Gowa merumuskan Rencana Aksi dan Rencana Tindak Lanjut yang memuat 19 kegiatan prioritas dan mendesak. Semua kegiatan itu merupakan jawaban dari semua hambatan yang ada di area Penyedia dan Pengguna Layanan, Kualitas Layanan dan Lingkungan Pendukung. Dengan melaksanakan RTL mereka menjamin pencapaian target pencatatan kelahiran dalam tahun 2019 yakni, 90% anak usia 0-18 tahun termasuk anak rentan memiliki akta kelahiran. Mereka sepakat segera setelah lokakarya langsung melaksanakan salah satu kegiatan RTL yakni mensosialisasikan SOP integratif dan aplikasi pencatatan kelahiran secara *online*.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Program ini. Hubungi kami melalui email info@bakti.or.id

Oleh **Syaifullah**

Pernah dengar kisah sekumpulan ibu-ibu yang bereaksi sampai menyegel kantor desa? Mungkin terdengar aneh, tapi ini kisah sungguhan. Terjadi di Desa Waikoko, Kecamatan Wewewa Tengah, Sumba Barat Daya.

Aksi itu terjadi di tahun 2013, ibu-ibu Desa Waikoko mengambil jalan terakhir menyegel kantor desa. Musababnya, mereka kecewa pada kinerja aparat desa yang mereka anggap sangat lamban. Surat rekomendasi pembentukan organisasi yang mereka ajukan, tidak juga ditandatangani. Kepala desa dengan berbagai alasan selalu menolak menandatangani surat rekomendasi itu. Kantor desa pun lebih sering kosong melompong.

“Kantor isinya hanya meja sama kursi saja. Daripada sapi masuk, kami segel saja,” kata Wilhelmina Mali Dappa(43).

Wilhelmina atau yang akrab disapa Mama Sani adalah penggerak aksi penyegelan itu. Ibu tujuh orang anak itu menjabat sebagai Sekertaris Cabang Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Sumba Barat Daya. Bersama 30 perempuan yang sama-sama aktif di KPI Desa Waikoko, mereka mengambil langkah terakhir melampiaskan kekesalan dengan menyegel kantor desa.

“Kami pakai bambu, dipasang melintang di semua pintu dan jendela,” tuturnya. “Waktu itu saya bilang sama laki-laki, ‘kalian tidak usah ikut campur, ini urusan perempuan,’” kata Mama Sani dengan penuh semangat.

Keberanian Mama Sani dan ibu-ibu Desa Waikoko itu bermula setahun sebelumnya, ketika mereka memula persentuhan dengan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI).

Pertama Kalinya Ikut Musrenbang Desa

Tahun 2012, ibu-ibu Desa Wekokor bersama perempuan-perempuan lain dari beberapa desa di Sumba Barat Daya berkenalan dengan KPI. Lewat berbagai sosialisasi dan pelatihan, para perempuan itu menyadari hak mereka yang selama ini selalu terabaikan. Salah satunya adalah ikut dalam musyawarah perencanaan dan pembangunan (Musrenbang) desa.

Untuk pertama kalinya dalam sejarah Desa Wekokor, di awal tahun 2013 Mama Sani dan lima perempuan lainnya hadir dalam Musrenbang Desa. Tidak ada undangan buat mereka, tapi dengan penuh kesadaran mereka hadir di antara para pria peserta Musrenbang.

Mereka bukan hanya hadir, tapi ikut berperan dalam musyawarah itu. Peran pertama adalah mengusulkan agar laporan penggunaan anggaran dana desa selama 2012 ikut dibahas. Awalnya

Mama Sani

Perempuan Aktivis dari Sumba Barat Daya



panitia menerima usulan tersebut. Namun, ketika pak camat yang juga hadir sudah meninggalkan lokasi, pembahasan itu dilewatkan begitu saja.

“Sepertinya usulan itu dianggap biasa saja, karena kita perempuan,” kata Mama Sani. “Kami langsung ketuk meja. Bagaimana ini? Usulan kami sudah diterima tapi kenapa sekarang dilewatkan saja? Jangan karena pak camat sudah pulang baru kita seenak begitu.” Sambungnya dengan penuh semangat.

Pimpinan rapat sempat marah, menganggap seolah-olah mereka diatur oleh perempuan. Tapi Mama Sani dan teman-temannya bersikeras, mereka sadar kalau itu adalah hak mereka dan mereka tidak akan menyerah sampai hak mereka dipenuhi.

Pimpinan rapat akhirnya luluh, dengan tergagap-gagap mereka menerima usulan membahas laporan penggunaan dana desa. Tapi, rupanya aparat desa memang belum menyiapkan laporan seperti yang diminta oleh warga. Mereka awalnya berkecil hati hingga akhirnya mengakui ketika pak camat mendadak kembali ke lokasi Musrenbang.

“Sudah, akhirnya kita terima alasan pimpinan rapat. Apalagi mereka mengaku siap untuk membuat laporan setelah Musrenbang,” kata Mama Sani. Tapi janji tinggal janji, hingga tahun berganti laporan yang diminta tidak juga terbit.



Foto: Dok. Yayasan BakTI/Syairullah



Musrenbang itu jadi sejarah baru di Desa Wekokor. Enam orang perempuan yang hadir tanpa diundang ternyata bersuara keras meminta hak mereka atas keterbukaan informasi. Meski harus beradu mulut dalam suasana yang panas, toh akhirnya pimpinan rapat dan aparat desa menyerah juga.

Diajarkan Untuk Memahami Hak Perempuan

Setelah bergabung sebagai anggota dan pengurus Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), perempuan yang terlibat di Sumba Barat Daya memang lebih berani untuk tampil. Melalui berbagai kegiatan penguatan kapasitas anggota dan kader, mereka jadi benar-benar memahami kalau hak perempuan juga sama dengan laki-laki. Pelatihan itu difasilitasi oleh Sekretariat Nasional KPI dengan pelatihan dasar kepemimpinan sebagai permulaan. Para peserta pelatihan didorong untuk mengenali hak, kewajiban dan isu-isu penting dalam kehidupan perempuan. Mereka dikenalkan dengan beragam undang-undang. Dari undang-undang perlindungan

anak, undang-undang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, hingga undang-undang desa.

Pun, mereka dilatih untuk menyampaikan pendapat.

“Kita sebelumnya memang sudah ada kelompok tani. Tapi selama ini kan, cuma ketua saja yang bicara,” kata Mama Sani.

Hasil dari pelatihan itu kemudian menyadarkan para perempuan anggota KPI di Sumba Barat Daya kalau mereka juga punya hak untuk ikut dalam Musrenbang Desa. Mereka punya hak dilibatkan dalam perencanaan desa dan punya hak untuk mengawal penggunaan dana desa.

“Teman-teman itu kaget, ternyata kita juga punya hak untuk itu,” ujarnya lagi. Dulu mereka mengira, hak seperti itu hanya milik para pejabat dan petinggi desa serta kecamatan saja. Pengetahuan dan bekal pelatihan itulah yang kemudian mereka gunakan untuk mengubah sejarah desa Wekokor. Untuk pertama kalinya, enam orang perempuan hadir dalam Musrenbang dan bahkan membuat panas suasana dengan



Suasana kampung Tambera (kanan)
Meru Dama Nuna, mama petani dari
Kampung Tambera (kiri atas) dan
Daniel Wawo Bulu (kiri atas)
Foto Dok. Yayasan BaKTI/ Syaifullah



desakan mereka atas transparansi penggunaan dana desa.

Sejak saat itu, peran perempuan yang tergabung dalam Koalisi Perempuan Indonesia Sumba Barat Daya semakin menonjol. Mereka aktif berorganisasi, aktif juga berperan dalam perencanaan dan pembangunan di desa mereka masing-masing. Mama Sani diangkat menjadi sekretaris cabang KPI Sumba Barat Daya.

Beberapa perempuan anggota lainnya bahkan sudah duduk di pemerintahan desa. Ada yang menjadi kepala urusan pemerintahan, ada pula yang menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa. Menurut Mama Sani ini adalah contoh yang mengembirakan setelah selama ini kaum perempuan hanya dianggap kompeten untuk urusan domestik. Hanya sebatas dapur, sumur, dan kasur.

Sayangnya, keaktifan perempuan berorganisasi melalui KPI sempat terganjal sesuatu yang tidak mengenakkan.

Mei 2013, bertempat di Desa Waikokor, KPI Sumba Barat Daya mengadakan konferensi cabang. Hadir juga dua perwakilan KPI pusat yang

ikut memberikan materi di pertemuan itu. Tanpa mereka sadari, sebuah desas-desus tidak enak tentang pertemuan itu mampir di kuping camat Wewewa Tengah. Mama Sani kaget ketika beberapa orang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mendatangi lokasi pertemuan mereka. Satpol PP itu meminta Mama Sani ikut ke kantor camat atas suruhan langsung dari pak camat.

Rupanya ada yang mengadukan pertemuan itu, tentu dengan tambahan beberapa cerita yang tidak sepenuhnya benar. Masalah itu akhirnya terselesaikan dengan damai ketika Mama Sani dan perwakilan KPI pusat menjelaskan tentang acara tersebut kepada pak camat.

Kejadian itu dianggap Mama Sani sebagai sebuah ujian untuk para perempuan yang ingin berorganisasi dan mengembangkan kapasitas mereka.

Pertanian Ramah Lingkungan

Penguatan dan peningkatan kapasitas yang dilakukan KPI bukan hanya di bidang organisasi saja. Perempuan anggota KPI di Sumba Barat Daya juga aktif dalam kegiatan lain seperti pertanian, perkebunan dan kerajinan tangan. Sesekali mereka saling bertemu untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan. Dari pertemuan itu, beberapa ide terlontar untuk kemudian diwujudkan dalam kerja nyata.

Salah satu kegiatan yang dikerjakan sekarang adalah pertanian ramah lingkungan. Kegiatan ini adalah kegiatan yang dilaksanakan bersama KPI pusat dan didukung oleh Millenium Challenge Account Indonesia (MCA-Indonesia).

Pertanian ramah lingkungan yang dilaksanakan sejak Juli 2016 ini diawali dengan sosialisasi dari tingkat cabang hingga penerima program. Lokasinya ada di dua desa: Mareda Kalada dan Mainda Ole.



Mama Sani di depan kantor cabang KPI Sumba Barat Daya
Foto Dok. Yayasan BaKTI/ Syaifullah

Praktik pertanian ramah lingkungan ini fokus pada pertanian jagung lokal. Diawali dengan beberapa pengetahuan tentang penyiapan lahan berupa lubang permanen, hingga penggunaan bahan organik sebagai pupuk dan pestisida. Pengetahuan warga yang sudah ada disempurnakan dengan pengetahuan baru, utamanya yang berhubungan dengan cara-cara yang lebih ramah lingkungan.

Mama Sani mengaku tidak didampingi oleh fasilitator. Dia mempelajari semuanya lewat buku-buku petunjuk, lalu melakukan uji coba sendiri hingga menemukan hasil yang tepat. Mama Sani bahkan akhirnya berkeliling ke banyak tempat, membagikan pengetahuannya. Dari pengetahuan tentang bercocok tanam hingga pengetahuan tentang cara membuat pestisida organik.

Mama Sani bukan hanya membagikan pengetahuannya perihal bercocok tanam, namun dia pun sering kali diundang ke berbagai desa untuk berbagi pengetahuan tentang manajemen simpan pinjam. Desa terakhir yang mengajaknya untuk berbagi pengetahuan adalah Desa Wee Wela di Kecamatan Kodi Utara, Sumba Barat Daya.

Berawal dari seorang perempuan desa yang tidak memahami haknya, Mama Sani perlahan

menjadi perempuan yang berdaya. Perempuan yang mulai memahami haknya, bahkan berani bersuara lantang memperjuangkan haknya. Dengan tekad kuat dan keberaniannya, Mama Sani menggalang kekuatan sesama perempuan di Sumba Barat Daya. Mereka tidak hanya aktif dalam kegiatan seperti pertanian, kerajinan tangan serta kesehatan perempuan dan anak, tapi mereka bahkan berani bersuara keras meminta hak mereka di dalam struktur pemerintahan desa.

Penyegelan kantor desa adalah puncak unjuk kekuatan mereka, perempuan Desa Wekoko. Langkah yang menurut Mama Sani adalah langkah terakhir. Langkah yang sekaligus menguatkan kesan kalau perempuan juga bisa bersuara keras, bukan hanya menerima apa yang diputuskan oleh laki-laki.

Tahun 2017, Mama Sani mendapatkan penghargaan Perempuan Pembawa Perubahan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penghargaan ini menegaskan betapa seorang Mama Sani adalah memang seorang perempuan aktivis dari Sumba Barat Daya.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Informasi lebih jauh tentang Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Pengetahuan Hijau di Indonesia, silakan menghubungi email: info@bakti.or.id

Dinamika Struktur Sosial Teluk Ambon

Oleh
Gadri Ramadhan Attamimi, S.Pi

Teluk Ambon adalah wilayah pesisir yang berada pada Pulau Ambon serta diapit oleh Negeri-negeri adat pesisir, dengan total panjang garis pantai 102,7 Km. Kota Ambon memiliki 5 Kecamatan dan 30 Negeri (adat) serta 20 Kelurahan (desa administratif). Menurut BPS dalam kriteria kelas kota, Kota Ambon tergolong dalam kelas kota sedang dengan jumlah penduduk antara 100.000-500.000 jiwa. Kota Ambon merupakan kota dengan angka laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dimana di tahun 2011 mencapai angka 11,30% dengan angka rata-rata pertumbuhan penduduk dari tahun 2007-2011 sebesar 8,22%.

Kawasan Teluk Kota Ambon mempunyai fungsi sosial-ekonomi, yaitu dapat menopang kehidupan masyarakat serta dapat memenuhi kehidupan masyarakat kawasan, dimana kegiatan yang terdapat di kawasan Teluk Kota Ambon dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Kegiatan yang



mendukung fungsi ekonomis kawasan teluk sebagai jasa-jasa pendukung kehidupan dengan pengembangan jasa perhubungan laut yakni pelabuhan.

Teluk Ambon Sebagai Identitas Kota

Teluk Ambon dan sekitarnya memiliki beberapa fungsi dan kegunaan yaitu sebagai daerah perikanan tangkap dan budidaya, pelabuhan pangkalan TNI Angkatan Laut dan POLAIRUD, pelabuhan kapal PT Pelni, kapal tradisional antar pulau dan fery penyeberangan, pelabuhan perikanan, jalur transportasi laut, tempat pembuangan limbah air panas oleh PLN, dermaga tempat perbaikan kapal, tempat penambangan pasir dan batu, daerah konservasi, tempat rekreasi dan olahraga, tempat pendidikan dan penelitian serta pemukiman penduduk.

Dengan kondisi Teluk Ambon sebagai pusat perekonomian Kota Ambon, maka sudah barang tentu masyarakat yang ada di sekitarnya memanfaatkan sumberdaya Teluk Ambon baik sebagai jasa lingkungan maupun sebagai mata pencaharian kehidupan mereka melalui perikanan tangkap. Kondisi tersebut semakin memperjelas Teluk Ambon sebagai identitas Kota Ambon.

Masyarakat disalah satu Negeri (desa) di Maluku membentangkan kain putih panjang (kain gandong) untuk menyambut saudara Pela mereka dari Negeri lain.

Sumber foto: <http://aldirontahalele.blogspot.co.id>

Tulisan ini terbagi kedalam tiga periode, yaitu periode sebelum konflik, periode konflik dan periode setelah konflik.

Pra-Konflik Ambon

Masyarakat Teluk Ambon Dalam sebelum terjadi konflik horizontal antar agama memanfaatkan sumberdaya pesisir dan laut di Teluk Ambon Dalam berdasarkan hubungan *pela* dan *gandong*. Hubungan *pela* dan *gandong* tersebut adalah hubungan keterikatan berdasarkan perjanjian atau sumpah para leluhur antar Negeri yang beragama Islam dan yang Beragama Kristen dari dua Negeri Adat yaitu Negeri Batu Merah dan Negei Passo. Keterlekatan antar dua Negeri tersebut berdasarkan sumpah para leluhur.

Bentuk persekutuan *pela* antara kedua negeri ini adalah "*Pela Keras* atau *Pela Gandong*". dan perkawinan antara kedua masyarakat dilarang, mengenai terjadinya hubungan *pela* ini dituturkan sebagai berikut. Bahwa sekitar tahun 1509, utusan kedua Negeri ini pergi ke Ternate

untuk menyerahkan upeti kepada Sultan Ternate. Dalam pelayaran pulang dari Ternate ketika tiba di dekat pantai Pulau Buru, *kora-kora* dari Negeri Passo tiba-tiba mendapat kecelakan karena terkandas dan hampir tenggelam. Untunglah mereka ditolong oleh anak buah *kora-kora* dari Negeri Batu Merah yang dengan berusaha keras membantu memperbaiki kerusakan *kora-kora* Passo, akhirnya mereka dapat mendarat di sebuah tanjung yang kemudian di beri nama “Tanjung *Pela*”. Ditempat inilah kedua belah pihak sama-sama mengangkat sumpah untuk hidup rukun dan saling membantu seperti saudara kandung.

Upacara adat *pela* ini disimbolkan dengan dua bilah *panggayong* (dayung) yang diletakkan bersilang dan ditindih dengan sebuah batu. Kehidupan sosio-kultur yang erat melalui hubungan *pela gandong* ini, dimanfaatkan oleh kedua masyarakat Negeri ini melalui pemanfaatan Teluk Ambon sebagai penghubung antar sesama, sehingga dalam menggunakan sumberdaya disekitar terutama sumber daya perikanan dimanfaatkan dengan asas kekeluargaan dan kerukunan.

Kota Ambon dalam proses perkembangannya tidak terlepas dari posisi intinya sebagai Ibu Kota Pemerintahan Maluku ternyata telah menyebabkan kota ini tumbuh dan berkembang menjadi kota semi modern. Kehidupan ekonomi rakyat tergantung pada negeri-negeri di sekitar dan pulau-pulau sekelilingnya. Saat itu aktivitas dan fasilitas perdagangan berpusat pada daerah yang terletak di dekat pelabuhan. Aktivitas perekonomian yang menonjol adalah meliputi perikanan dan perdagangan.

Selain itu, kehidupan masyarakat adat di Teluk Ambon sebelum terjadinya konflik dalam menjual hasil perikanan tangkap tidak mengenal bahwa ini adalah hasil tangkapan dari masyarakat yang beragama Kristen maupun masyarakat yang beragama Islam. Hubungan perekonomian terjadi selaras seimbang dikarenakan masyarakat sadar penuh bahwa mereka terikat dengan hubungan satu darah, satu bangsa yaitu bangsa *Alifuru*.

Konflik Ambon

Pada tahun 1999 tepatnya tanggal 19 Januari terjadi letusan horizontal di Kota Ambon yang dilatarbelakangi perbedaan agama. Rusuh antar

masyarakat yang di latar belakang hegemoni Agama tak terbendung, kedua masyarakat yang mengklaim bahwa mereka adalah pemegang kekuatan di Kota Ambon. Kerusuhan Kota Ambon merusak seluruh tatanan masyarakat di Pulau Ambon terutama masyarakat adat yang ada di daerah Teluk Ambon.

Konflik di Ambon berdampak pada Perhubungan laut, pemanfaatan perikanan tangkap di Ambon juga menjadi terisolasi, masyarakat terutama nelayan yang akan melakukan aktifitas penangkapan di teluk ambon dijadikan sasaran tembak oleh salah satu dari pihak yang bertikai, jalur Teluk Ambon yang dijadikan jalur penyebrangan oleh alat perhubungan speed maupun feri penyebrangan pun sama selalu di tembak oleh oknum yang bertikai. Keterisolasian akses antar sesama masyarakat di Teluk Ambon sangat memprihatinkan, perekonomian pasar ikan yang sedari dulu ramai dengan *jibu-jibu* ikan oleh istri nelayan tidak terlihat lagi di karenakan kerusuhan tersebut.

Semakin kompleksnya kehidupan masyarakat akibat dari keterisolasian akan kebutuhan hidup mereka mengakibatkan masyarakat nelayan banyak beralih profesi ke darat yakni menjadi tukang bangunan, buruh, maupun petani. Pandangan mereka bahwa profesi tersebut membawa rasa aman bagi mereka untuk bertahan hidup pada kondisi konflik.

Pasca Konflik

Setelah perjanjian Malino yang menghasilkan kesepakatan perdamaian antar perwakilan tokoh masyarakat dan tokoh agama dua komunitas ini, aktifitas Kota Ambon berangsur aman. Pertumbuhan perekonomian Kota Ambon berangsur pulih. Ini terlihat dengan perkembangan penduduknya. Tingkat pertumbuhan penduduk di Kota Ambon pasca Konflik cukup tinggi, di Kota Ambon sendiri, angka kepadatan penduduk yang tinggal untuk wilayah seluas 1 km² mencapai 755 orang per km².

Meskipun ada rasa trauma tersendiri dari masyarakat di antara dua komunitas agama tersebut. Kondisi Kota Ambon yang berangsur membaik menjadikan investor kembali melirik Kota Ambon sebagai lahan investasi mereka. pembangunan kembali dilakukan oleh

pemerintah dan selama 4 tahun berlangsung Ambon kembali terpilih menjadi pusat kegiatan nasional (PKN) kawasan Indonesia Timur. Kebijakan PKN inilah yang semakin merubah watak masyarakat Kota Ambon. Seakan terkejut dengan kondisi yang berangsur membaik lewat pembangunan perhotelan, properti *citra land*, *mall*, industri perikanan, dan pembangunan yang lain menjadikan masyarakat Kota Ambon menjadi masyarakat kota yang meniadakan unsur-unsur kebudayaan para leluhur mereka karena keterkangkangan sewaktu kerusuhan lewat keterbatasan akses.

Perubahan sosial yang sangat signifikan terjadi adalah pada masyarakat nelayan. profesi nelayan sudah tidak lagi menjadi profesi idaman masyarakat yang tinggal di teluk ambon bergesernya profesi nelayan menjadi profesi buru di industri perikanan diakibatkan dari persaingan industri-industri perikanan yang dikuasai oleh investor swasta dan pemerintah selaku penentu kebijakan. Penguasaan tempat pelelangan ikan oleh pemkot diatur dan dikenakan retribusi bagi penjual ikan atau pengepul ikan. Kalaupun ada maka nelayan yang melakukan aktivitas penangkapan tersebut untuk kebutuhan hidup rumah tangga saja. Selain itu masyarakat juga mempunyai alasan tersendiri untuk tidak lagi menangkap, hal ini diakibatkan oleh jarak mencari ikan yang harus keluar Teluk Ambon sehingga membutuhkan biaya besar untuk membeli solar, mesin, dan kapal tangkap yang memadai. Alasan berikutnya adalah penurunan kualitas lingkungan Teluk Ambon Dalam.

Penurunan kualitas perairan kota ambon yang diakibatkan oleh aktifitas masyarakat maupun industri pada Teluk Ambon, hal lain yang didapatkan adalah hilangnya salah satu jenis dari ekosistem terumbu karang.

Kondisi seperti ini sangat memprihatinkan karena manusia sudah jauh dari kultur masyarakat yang ada di Teluk Ambon sebagai masyarakat bahari. Posisi negeri-negeri adat seharusnya menjaga hak-hak adat berubah menjadi negeri yang masyarakatnya serba instan dan modern. Terbukti ketika pembangunan *mall Ambon City Center* (ACC) diatas tanah hak ulayat Negeri Passo dimana terdapat Ekosistem Mangrove yang dialihfungsikan sebagai *mall* tersebut dengan garansi bahwa mengatasi

pengangguran masyarakat Negeri Passo hal ini terlihat dari masyarakat yang bekerja pada *mall* tersebut mayoritasnya adalah masyarakat Negeri Passo.

Keterkaitan antara masyarakat dan Teluk Ambon khususnya Teluk Ambon Dalam sangat besar, namun terbawanya masyarakat oleh arus globalisasi menjadikan masyarakat Kota Ambon berubah dari masyarakat Negeri adat ke masyarakat Negeri modern yang lupa akan identitas kebahiannya. Seharusnya ketika terjadinya konflik dan konsensus melalui peladong sebagai identitas adat serta perjanjian malino sebagai konsensus untuk mempererat kembali hubungan kedua masyarakat beragama ini menjadikan masyarakat memiliki semangat untuk bangkit dari keterpurukan sosial mereka.

Masyarakat seharusnya memperkuat ciri khasnya agar sukses menjalani kehidupannya sebagai masyarakat modern berciri khas adat artinya kebudayaan dan modernitas berjalan bersama. Fenomena perubahan yang terjadi pada masyarakat yang diakibatkan oleh konflik menceritakan bagaimana masyarakat bisa melewati kejadian sosial pada lingkungannya sehingga diperhadapkan dengan dua pilihan tetap pada identitas sosialnya atau merubah identitasnya. Ketidakberdayaan masyarakat mengimbangi arus globalisasi yang terjadi bisa saja mengakibatkan ketidak seimbangan lingkungan di Teluk Ambon sehingga masyarakat disekitar akan kehilangan peradabannya.

Pemberian ruang akses kembali kepada masyarakat nelayan sangat diperlukan sehingga pemerintah selaku penentu kebijakan memberikan hak-hak masyarakat adat sesuai dengan kultur dan budaya mereka. Ketergantungan akan pabrik industri perikanan yang mengalihkan profesi masyarakat dikembalikan kembali sehingga dapat bekerjasama dengan pabrik selaku pengelolah dan nelayan sebagai pelaku penangkapan yang dilandasi dengan kaidah-kaidah lingkungan dan keadilan serta keuntungan bersama.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah Pemuda Kota Ambon, yang sedang menyelesaikan studi Magister pada Institut Pertanian Bogor, Program Studi Sosiologi Pedesaan, Fakultas Ekologi Manusia.



PARTISIPASI KONSTITUEN DALAM PENYUSUNAN PERDA

Oleh **M. GHUFRAN H. KORDI K.**

Dalam pembentukan kebijakan di daerah, anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) perlu membuka ruang yang memungkinkan konstituen atau masyarakat untuk mengikuti berbagai proses, baik terlibat langsung dalam proses pembentukan, maupun hanya mengikuti tahapan prosesnya. Ini penting karena setiap kebijakan dapat berdampak pada konstituen dalam berbagai bentuk.

Sebagai wakil rakyat, anggota DPRD perlu memberi informasi yang benar kepada konstituennya mengenai dampak dari pembentukan dan penerapan sebuah kebijakan. Jika kebijakan yang dibentuk akan berdampak positif bagi konstituen, maka konstituen harus mengetahui apa-apa yang dapat bermanfaat bagi mereka dan apa yang disiapkan untuk memperoleh manfaat dari kebijakan tersebut.

Sering terjadi, masyarakat tidak dapat mengakses layanan tertentu karena

ketidaktahuan atau ketidak-berdayaan mereka. Sementara elit-elit masyarakat setempat, termasuk aparat pemerintah setempat, mencari cara yang mudah dengan mendaftar atau memasukkan orang-orang terdekat saja.

Pengalaman Program MAMPU (Kemitraan Australia-Indonesia untuk

Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan) di mana penguatan masyarakat melalui kelompok konstituen (KK) berdampak pada perubahan di tingkat masyarakat. KK yang melakukan pendataan ulang terhadap penerima beras sejahtera (rasta)-beras miskin (raskin)-memberi masukan kepada pemerintah di tingkat kelurahan/desa, kecamatan, hingga kabupaten/kota, untuk mengubah daftar penerima rasta. Sebagian penerima rasta adalah keluarga yang secara ekonomi lebih baik, sedangkan terdapat keluarga yang lebih miskin tidak menerima rasta.

Dengan memperkuat masyarakat atau konstituen, anggota DPRD ikut mendidik konstituen secara politik. Konstituen yang mempunyai kapasitas dan terdidik memudahkan tugas-tugas anggota DPRD. Di samping konstituen yang memperoleh manfaat dari anggota DPRD tidak mudah memilih calon lain dalam pemilihan anggota legislatif.

Anggota DPRD perlu selalu menyampaikan kebijakan yang akan dibentuk oleh DPRD dan

Jika DPRD dan pemerintah membentuk kebijakan yang mengharuskan masyarakat berkontribusi pada pembangunan, maka sejak awal masyarakat harus mengetahui dan ikut berpartisipasi dalam pembentukan aturan tersebut.

pemerintah daerah, menerima masukan dan koreksi dari konstituen, dan menyiapkan konstituen untuk menerima kebijakan tersebut. Berikut beberapa dampak terhadap konstituen bila sebuah kebijakan dibuat.

Pertama, masyarakat atau konstituennya memperoleh manfaat dari kebijakan yang dibentuk, misalnya mengakses layanan yang diadakan atau disediakan. Sebagai contoh, pembentukan Perda Perlindungan Perempuan dan Anak. Pembentukan Perda tersebut melahirkan layanan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) hingga di tingkat desa/kelurahan, bahkan RT/RW atau paralegal. Layanan tersebut disediakan oleh pemerintah dan harus disosialisasikan kepada konstituen. Anggota DPRD dapat mensosialisasikan keberadaan P2TP2A dan jenis layanan yang tersedia kepada konstituennya.

Anggota DPRD Kota Kendari, Sitti Nurhan Rachman mengemas sosialisasi mengenai penyuluhan kesehatan reproduksi dalam bentuk Reses Partisipatif. Reses tersebut menghasilkan daftar nama konstituen perempuan untuk melakukan pemeriksaan pap smear dan tes IVA (Inspeksi Visual dengan Asam Asetat), yang sebelumnya tidak pernah diketahui, baik penyakit terkait kesehatan reproduksi perempuan maupun tersediannya pemeriksaan pap smear dan tes IVA di instansi pemerintah.

Kasus penderita kanker serviks dan kanker payudara di Kota Kendari baru mulai bermunculan dan mendapat respon dari pemerintah daerah, setelah kelompok konstituen mengadukan kepada anggota DPRD. Kanker serviks dan kanker payudara menjadi perhatian publik setelah beberapa anggota DPRD membawa daftar penderita ke SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait. Ironisnya, SKPD terkait mempunyai program-program yang berhubungan dengan penyuluhan dan penanganan penderita kanker serviks dan

kanker payudara. Dan program-program tersebut tidak diketahui oleh masyarakat.

Kedua, kebijakan yang menuntut masyarakat atau konstituen berkontribusi pada pembangunan, misalnya membayar retribusi dan lain-lain. Jika DPRD dan pemerintah membentuk kebijakan yang mengharuskan masyarakat berkontribusi pada pembangunan, maka sejak awal masyarakat harus mengetahui dan ikut berpartisipasi dalam pembentukan aturan tersebut.

Masyarakat diminta berkontribusi pada pembangunan tapi masyarakat tidak mengetahui prosesnya. Padahal pemerintah daerah melalui SKPD selalu mempunyai keterbatasan dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Untuk mengatasinya, maka perlu keterlibatan masyarakat. Namun, pelibatan masyarakat harus dimulai sejak awal, ketika baru disiapkan pembentukan kebijakan. Ini akan memberi dua keuntungan sekaligus, yaitu: (1) masyarakat ikut berkontribusi pada pembentukan kebijakan, sehingga masyarakat merasa memiliki dan peduli terhadap kebijakan tersebut; dan (2) karena masyarakat mengesahkannya, maka dengan mudah ikut mengawasi proses implementasinya. Jika terjadi penyelewengan di lapangan, masyarakat dengan mudah mengetahuinya karena juga mengetahui aturan yang dibentuk.

Ketiga, kebijakan yang berdampak negatif, misalnya kerusakan lingkungan, relokasi, dan sebagainya. Pembentukan kebijakan terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, kemungkinan berdampak negatif terhadap masyarakat atau konstituen. Anggota DPRD perlu menyampaikan kepada konstituennya mengenai kebijakan yang dibentuk tersebut sejak awal. Dengan begitu, konstituen sejak awal sudah menyiapkan diri untuk menghadapi dampak yang terjadi.

Selain berkontribusi pada pembentukan kebijakan, masyarakat juga sudah mempunyai persiapan-persiapan jika suatu saat terjadi

perubahan yang kemungkinan berdampak negatif, yang tidak diprediksi sejak awal. Setiap kebijakan akan berdampak pada masyarakat, dan di antara dampak tersebut kemungkinan tidak dapat diprediksi. Namun, masyarakat telah dipersiapkan untuk menghadapi situasi yang terjadi.

Memperkuat Partisipasi Konstituen

Sebagai pihak yang mempunyai fungsi legislasi, anggota DPRD dapat mengusulkan pembentukan peraturan daerah (Perda). Karena merupakan kebijakan yang dibentuk bersama antara DPRD dan pemerintah daerah, pembentukan perda mensyaratkan pelibatan atau partisipasi masyarakat. Di samping itu, perda adalah instrumen yang bila diterapkan akan berdampak pada masyarakat, tidak hanya positif, tetapi juga negatif.

Namun, partisipasi masyarakat dalam pembentukan perundang-undangan tidak terjadi begitu saja. Hanya sedikit masyarakat yang peduli dan mau ikut terlibat dalam pembentukan perundang-undangan, termasuk masyarakat yang berkepentingan atau terkena dampak dari peraturan perundang-undangan yang dibentuk.

Di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, pelibatan masyarakat dalam pembentukan perda hanya pada tingkat konsultasi publik, baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun DPRD. Penulis mempunyai pengalaman dalam setiap konsultasi publik, dan peserta konsultasi publik baru tahu ada pembentukan Perda tersebut pada saat itu.

Kondisi ini harus diubah oleh Anggota DPRD dan DPRD dalam setiap pembentukan perda. Anggota DPRD dan DPRD perlu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap pembentukan perda. Karena setiap anggota DPRD mempunyai konstituen, maka adalah kewajibannya untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi konstituen tersebut. Berikut beberapa hal yang dapat ditempuh oleh anggota DPRD.

Pertama, Anggota DPRD sejak awal mensosialisasikan Propemperda (program pembentukan Perda) kepada konstituennya. Sekalipun Propemperda adalah informasi yang terbuka dan dimuat oleh media massa, namun

hanya sedikit masyarakat yang mengetahuinya. Anggota DPRD dapat mensosialisasikan Propemperda tersebut kepada konstituennya baik melalui reses maupun kegiatan lainnya. Dengan mengetahui Perda apa saja yang akan dibentuk oleh DPRD dan pemerintah daerah, konstituen mempunyai gambaran mengenai Perda-perda tersebut.

Kedua, meminta masukan sejak awal mengenai permasalahan atau materi terkait dengan Raperda. Anggota DPRD dapat meminta masukan mengenai permasalahan atau materi tentang suatu perda sejak awal, melalui reses atau kegiatan lainnya. Konstituen perlu diajak untuk mendiskusikan suatu masalah yang akan diperdakan, terutama jika masalah atau materi yang diatur nantinya berdampak pada konstituen.

Ketiga, menyebarkan draft Raperda dan naskah akademik kepada masyarakat. Jika suatu Raperda dalam pembahasan, maka anggota DPRD perlu menyebarluaskan draft Raperda dan naskah akademik kepada konstituen sejak awal. Ini akan memberi kesempatan kepada konstituen untuk memberi masukan, sehingga juga dapat menjadi bahan diskusi bagi anggota DPRD dalam pembahasan draft Raperda, baik di tingkat komisi, fraksi, maupun tim pansus.

Keempat, konsultasi publik dapat dilakukan pada berbagai komponen dan dalam berbagai tahap. Selama ini konsultasi publik draft Raperda tertentu biasanya dilakukan oleh DPRD atau pemerintah daerah. Sehingga konsultasi publik hanya melegitimasi pengesahan Perda. Masyarakat mempunyai waktu yang terbatas untuk memberi masukan terhadap draft Raperda pada konsultasi publik tersebut.

Anggota DPRD perlu berinisiatif untuk mengusulkan kepada tim perumus, tim pansus, atau tim ahli yang sementara membuat draft Raperda, sehingga membuka ruang bagi masyarakat dan konstituennya untuk memberi masukan. Jika hal tersebut terjadi, maka akan memudahkan perumusan draft Raperda. Jika suatu saat Raperda tersebut disahkan menjadi Perda dan diimplementasikan, maka Perda tersebut bukan barang asing bagi masyarakat.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Program MAMPU-Yayasan BaKTI anda dapat menghubungi email info@bakti.or.id



Ikhtiar Memutus Rantai Pernikahan Dini

Oleh **Fathul Rahman**

Pernikahan dini ibarat mata rantai yang tidak terputus. Dia bertemali dengan kemiskinan. Keluarga miskin cenderung melakukan praktik pernikahan dini. Anak-anak yang lahir dari orangtua yang belum matang secara psikis, fisik, dan ekonomi itu pada akhirnya menjadi anak-anak yang miskin, tidak terjamin kesehatan dan pendidikan, dan kelak mereka akan kembali mengulang praktik orangtua mereka. Menikah di usia sangat muda. Di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), praktik menikah dini itu dipicu juga oleh tradisi yang dikenal dengan *merariq*. Sering diterjemahkan dengan *kawin lari*.

Kulitnya kuning langsung dan badannya yang besar membuat EN terlihat lebih dewasa dari usianya. Padahal dia baru duduk di bangku kelas VI SD. Di usianya yang masih senang bermain karet itu, banyak remaja yang menyukainya. Termasuk juga orang yang usianya terpaut jauh dari EN. Setamat SD, salah seorang pria yang menyukai EN itu mengajak menikah. Terang saja EN menolak. EN yang masih bau kencur, tidak pernah membayangkan akan menikah. Diam-diam lelaki yang menyukai EN itu datang ke rumah EN. Entah apa yang dibicarakan dengan ibunya, sepulang dari main bersama teman-temannya EN diminta mengemas pakaian.



EN dijemput salah satu lelaki yang menyukaianya itu. Diajak naik motor, EN dibawa ke rumah orangtua laki-laki di desa yang jarak rumahnya dari EN sekitar 15 km. EN diminta menginap di rumah orangtua laki-laki itu. Pada hari ketiga EN sadar bahwa dia sudah dibawa “merariq”. Merariq ini arti sebenarnya menikah, tapi karena praktik di Lombok, mempelai perempuan dibawa, bukan dilamar, maka merariq dikenal dengan “kawin lari”.

Hanya berselang seminggu setelah dibawa merariq, EN kini menjadi istri. Dia tinggal di rumah orangtua suaminya yang pengangguran. Sehari-hari, EN menjalankan rutinitas memasak, mencuci, membersihkan rumah, dan sesekali bermain dengan remaja seusianya di kampung halaman suaminya. Memasuki bulan kedua pernikahan mereka, EN menyandang status baru : janda.

Di Dusun Bun Bleng, Desa Sekotong Timur, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat saya berjumpa dengan SN, 16 tahun. Perempuan ini hanya menamatkan pendidikan sampai SD. Tinggal di kampung terpencil di gugusan Gunung Mareje, orangtua SN tak mampu menyekolahkan-kannya. Orangtuanya hanya petani miskin. SN diminta tidak sekolah agar bisa membantu di ladang dan membantu mengurus adiknya yang masih kecil, jika ibunya ke ladang. Dua tahun menganggur, seorang pria dari dusun tetangga mengajak SN merariq. Tanpa pikir panjang SN menerima ajakan laki-laki itu. Menjalankan kewajiban sebagai istri, SN masih menyimpan harapan untuk melanjutkan sekolah. SN menuturkan, dia tidak sendiri, ada dua orang teman SD nya yang bersamaan menikah dengan SN. Satu diantaranya sudah menyandang status janda.



EN dan SN memiliki satu kesamaan, mereka lahir dari keluarga miskin. Pendidikan orangtua mereka rendah. EN misalnya, tinggal bersama ibu dan adik-adiknya serta saudaranya dari lain ibu di rumah berdinding bedek (bambu). Bapak EN adalah pria dengan tiga istri. Bahkan ketika EN dibawa merariq, bapak EN tidak tahu. Saat itu bapak EN di rumah istrinya yang lain. Saat menjadi wali pernikahan putrinya, bapak EN juga tidak banyak berkomentar.

Begitu juga SN yang justru direstui orangtuanya untuk menikah. Pertimbangan mereka, jika putrinya mereka menikah, beban keluarga berkurang. Putri mereka akan menjadi tanggungan suami.

Kepala Badan Perlindungan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Lombok Timur H Suroto menyebutkan data Januari hingga Juli 2015 menunjukkan 27,6 persen pernikahan di Lombok Timur masuk kategori pernikahan dini. Angka resmi, dari 2.360 pernikahan yang tercatat, 562 diantaranya dilakukan oleh wanita di bawah 19 tahun. Bahkan untuk beberapa kecamatan, angka lebih miris akan diperoleh, seperti di Kecamatan Jerowaru yang mencapai 38,21 persen.

Data tahun 2016, di Kabupaten Lombok Timur angka pernikahan perempuan usia 10-14 tahun bertengger di angka 3,02 persen, usia 15-17

Para remaja di NTB yang tergabung dalam Forum Anak NTB membuat iklan untuk edukasi pencegahan pernikahan dini.

Foto Fathul Rahman

tahun bertengger di angka 28,44. Sementara usia 18-19 tahun mencapai 30,25. Data ini menunjukkan pernikahan pertama para perempuan di Lombok Timur dilakukan ketika mereka masih berstatus pelajar, atau masih dalam usia sekolah.

Perilaku seksual sebelum pernikahan yang sah hanya salah satu penyebab. Angkanya sangat kecil. Hal lain ialah karena tradisi mengesahkan merariq. Rendahnya pengetahuan terkait kesehatan reproduksi, kesadaran orangtua, faktor sosial, ekonomi, dan geografis, serta rendahnya penegakan hukum membuat praktik membawa lari mempelai perempuan dan pada akhirnya dinikahkan masih banyak terjadi.

Beberapa kasus pernikahan dini, mempelai perempuan masih berstatus pelajar SMP/ sederajat atau SMA/ sederajat. Ketika mereka menikah, mereka berhenti sekolah. Malu kembali ke sekolah atau mereka sibuk mengurus rumah tangga. Akhirnya tingginya kasus drop out juga disumbangkan oleh pernikahan dini.

Anak-anak yang dinikahkan juga kehilangan hak bermain. Pada usia remaja, mereka

seharusnya bisa bermain bersama teman-teman sebayanya. Namun, karena dinikahkan, mempelai pria maupun mempelai wanita yang masih berusia anak itu disibukkan dengan kehidupan rumah tangga.

Dampak lain pernikahan ini menyumbang tingginya angka perceraian dan angka kekerasan di dalam rumah tangga serta angka kematian ibu dan anak. Anak-anak usia remaja belum memiliki penghasilan tetap untuk nafkah. Hal ini menyebabkan konflik di dalam rumah tangga yang kerap berujung kekerasan dalam rumah tangga dan bermuara pada perceraian.

Menggandeng Tokoh Masyarakat, Merangkul Anak Muda

Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) menjadi perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB. Tingginya angka pernikahan dini membuat Pemprov NTB menaruh perhatian pada masalah ini. Sebenarnya, Provinsi NTB selangkah lebih maju dalam advokasi pendewasaan usia perkawinan. Gubernur sudah mengeluarkan edaran tentang pendewasaan usia perkawinan. Dalam Surat Edaran Gubernur NTB Nomor 180/1153/Kum Tahun 2014 itu disebutkan bahwa usia perkawinan ideal bagi laki-laki dan perempuan adalah 21 tahun. Usia 21 tahun, pertimbangannya usia ini tentu sudah tamat SMA. Program pendidikan 12 tahun bisa terpenuhi. Dari sisi kesiapan psikologis, usia 21 tahun dianggap sudah siap untuk berkeluarga.

"Pada usia ini juga kami menganggap calon mempelai sudah memiliki pekerjaan atau sedang bekerja sehingga jangan sampai pernikahan itu justru menambahkan jumlah keluarga miskin." kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB Hj. Hartina.

Mengintervensi tingginya pernikahan dini, pemerintah mendekati semua stakeholder. Misalnya untuk persoalan budaya merariq, pemerintah mendekati para tokoh masyarakat dan tokoh adat di desa-desa yang diidentifikasi memiliki kasus pernikahan dini. Kesepakatan dibuat dengan para tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah desa, hingga dusun

yang mengatur pencegahan pernikahan dini. Budaya merariq yang sering kali dijadikan alasan harus diluruskan. Bukan berarti anak-anak yang masih bersekolah dengan mudah dibawa merariq. Kini di beberapa desa di Lombok, jika ada anak yang dibawa menikah, keluarga mempelai laki-laki dan keluarga mempelai perempuan dikenakan denda yang cukup besar. Denda ini belum sepenuhnya efektif, tapi setidaknya bagi keluarga yang pas-pasan, berpikir dua kali untuk menikahkan anak mereka.

DP3AP2KB membuat forum rembuk warga di desa-desa yang masuk kategori merah kasus pernikahan usia dini. Pada forum rembuk yang diikuti juga para ibu dan remaja tersebut disepakati tentang pendewasaan usia perkawinan. Misalnya di beberapa desa sudah ada awig-awig (aturan adat) tentang usia perkawinan. Anak sekolah tidak boleh lagi dibawa merariq.

DP3AP2KB juga mengintervensi para remaja. Pada usia ini mereka masih labil, dan kerap kali ketika diajak menikah mereka mau. Disinilah DP3AP2KB masuk memberikan pemahaman tentang bahaya pernikahan dini. Dengan pemahaman ini diharapkan para remaja ini tidak berpikir untuk menikah ketika masih sekolah.

Dalam pendekatan ke remaja ini, DP3AP2KB juga melibatkan Forum Anak NTB. Jadi DP3AP2KB memakai pendekatan remaja sebaya. Adik-adik inilah yang memberikan pemahaman pada rekan seusia mereka untuk tidak menikah. Forum Anak NTB ini terdiri dari anak yang sedang kuliah, sukses di pendidikan, dan diharapkan bisa memotivasi remaja-remaja yang masih bersekolah. Selain Forum Anak ini, tentu saja DP3AP2KB juga membangun kerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi perempuan, PKK, ibu-ibu pengajian. Bahkan sekarang DP3AP2KB menyiapkan lembar Jumat yang muatannya pendewasaan usia perkawinan dan perlindungan perempuan. Jadi nanti khatib sholat Jumat membaca khutbah tentang materi pentingnya mencegah pernikahan dini.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah Redaktur Harian Lombok Post dan dapat dihubungi melalui email fathul428@gmail.com



Menempuh Jalan Panjang Konservasi

Oleh **Halia Asriani**

Sepanjang perjalanan dari Kecamatan Sinjai Barat menuju Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, pohon pinus terhampar sejauh mata memandang. Termasuk di salah satu desa bernama Desa Kompang, Kecamatan Sinjai Tengah. Konon pinus ini memang sengaja ditanam pada tahun 1980 melalui program konservasi pemerintah bertajuk Sejuta Pinus. Pada lahan seluas 460 Ha, puluhan ribu bibit



pinus ditanam di desa yang merupakan wilayah perbukitan dan pegunungan dengan kemiringan di atas 40 derajat ini.

Menanam pinus untuk program konservasi memang sangat dimungkinkan, mengingat secara teknis pinus adalah salah satu tanaman yang mudah ditanam dan tidak membutuhkan banyak perawatan. Ia mampu tumbuh dengan baik di tanah yang kurang subur, berpasir, hingga berbatu sekali pun. Tak butuh waktu yang lama pula untuk pinus bisa tumbuh besar.

Tatkala pinus-pinus mulai tumbuh besar, sebuah keanehan mulai terjadi. Sumber air warga Desa Kompang yang berasal dari mata air satu per satu menghilang. Debit air anak Sungai Saotanre yang terdapat di desa ini pun semakin berkurang. “Waktu kecil saya sering melihat keping di sungai. Tapi sekarang, sejak pinus ada sudah tidak pernah lagi.” Kenang Pak Hasyir, salah satu warga Desa Kompang. Desa sebelah, yakni Desa Gantarang khususnya di Dusun Bontolaisa, bahkan tak lagi memiliki sumber air. Warga terpaksa membuat saluran air dari desa sebelahnya dan membuat penampungan umum untuk memenuhi kebutuhan air.

Benarkah pinus penyebabnya?

Warga Desa Kompang sebenarnya telah sejak dulu menguasai lahan di desa mereka sebagai sumber penghidupan. Namun secara legal formal, dengan proses penunjukkan kawasan hutan, maka warga di sekitarnya tidak bisa mengakses wilayah tersebut. Padahal sebelumnya warga mengelolanya untuk menjadi sumber mata pencaharian dengan potensi sumber daya alam yang sangat kaya.

Pinus sendiri yang dipilih sebagai tanaman konservasi pada faktanya memiliki banyak kelebihan sekaligus kekurangan. Meski tanaman pinus bisa tumbuh dengan mudah dan cepat, juga menghasilkan hawa sejuk dan nyaman, namun ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk menjadikannya sebagai tanaman konservasi.

Pinus adalah tanaman berdaun jarum yang memiliki banyak stomata, sehingga banyak menyerap dan menguapkan air. Selain itu, daun pinus yang jatuh ke tanah akan sulit terlapuk dan menyebabkan air hujan sulit masuk ke dalam tanah. Banyaknya air yang diserap dan diuapkan oleh pinus, ditambah sedikitnya air yang meresap ke tanah ini membuat cadangan air dalam tanah menipis.



Foto: <http://desakompang.blogspot.com/>

Pinus-pinus di Desa Kompang sempat menarik perhatian perusahaan swasta. Masyarakat lalu dibujuk agar mau menjadi penyalur getah pinus. Getah pinus dapat digunakan sebagai bahan baku untuk *thinner*, pengencer cat. Pihak perusahaan menawarkan Rp 1.500 per kilo bagi masyarakat yang tertarik. Pak Asikin, salah seorang ketua kelompok tani tampil sebagai pengelola empat kelompok yang dibentuknya. Jumlah orang perkelompok adalah 25 orang dan akan melakukan penyaluran setiap hari. Jika sudah terkumpul maka orang suruhan perusahaan akan datang menjemput getah pinus tersebut untuk di ekspor ke Jepang. Bagi masyarakat desa, pekerjaan ini relatif sulit. Harga Rp 1.500 per kilo sangat tidak sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan. Sehingga satu persatu anggota kelompok tersebut menyerah.

Kini sudah ratusan bahkan ribuan pohon pinus di Desa Kompang disadap. Setiap pohon pinus bisa ada puluhan sayatan bekas penyaluran. Sebenarnya pohon pinus itu ditakutkan akan tumbang satu per satu akibat sayatan yang terlalu dalam. "Bila pinus mati mungkin jauh lebih baik. Pohon bergetah ini rakus air. Akarnya menghunjam tanah hingga gembur. Tak cukup

kokoh menahan erosi." Ungkap Asikin, ketua salah satu kelompok tani sekaligus salah satu tokoh masyarakat di Desa Kompang.

Puncaknya pada tahun 2006, ketika banjir bandang dan tanah longsor melanda sebagian daerah Kabupaten Sinjai. Di Desa Kompang, dua belas orang meninggal. Ratusan orang mengungsi dan puluhan rumah rusak parah.

Disinyalir bencana yang terjadi itu pun lagi-lagi diakibatkan keberadaan hutan pinus yang amat luas. Pinus merupakan tanaman yang tumbuh besar dan bisa mencapai tinggi hingga 40 meter. Bobotnya yang berat membuat tanah mudah bergeser ketika hujan deras. Ditambah lagi ia ditanam di wilayah dengan kemiringan di atas 40 derajat seperti Desa Kompang. Kini sebelas tahun sudah berlalu sejak bencana banjir bandang dan tanah longsor itu terjadi. Masyarakat Desa Kompang terus berbenah. Kini kehidupan sosial sudah berjalan normal.

Asikin tak bisa menyembunyikan penyesalannya sebagai salah satu tokoh masyarakat yang mendukung program sejuta pinus. Meski kini ia sadar itu tak benar, tapi itulah pengalaman hidupnya. Ia tak berhenti sekedar mengutuki perannya dalam program yang gagal

Pinus adalah tanaman berdaun jarum yang memiliki banyak stomata, sehingga banyak menyerap dan menguapkan air. Selain itu, daun pinus yang jatuh ke tanah akan sulit terlapuk dan menyebabkan air hujan sulit masuk ke dalam tanah. Banyaknya air yang diserap dan diuapkan oleh pinus, ditambah sedikitnya air yang meresap ke tanah ini membuat cadangan air dalam tanah menipis.

menaksir dampaknya lebih jauh itu. Kini ia adalah tokoh desa yang berjuang untuk perbaikan lingkungan di desanya.

Asikin pun fokus memberi motivasi bagi siswa-siswa SMP agar peduli terhadap lingkungan. Bersama para siswa, guru, anggota kelompok tani dan masyarakat Kompang, Asikin menuju lahan kritis seluas 300 ha. Mereka membawa sejumlah 300 bibit pohon mahoni yang siap ditanam.

Konservasi, secara harfiah berarti perlindungan atau pelestarian terhadap lingkungan atau sumber daya alam. Merujuk dari pengertiannya, penanaman di lahan-lahan yang gundul atau mengalami kerusakan memang adalah langkah yang tepat. Namun, proses konservasi tentu tidak sampai di situ saja. Konservasi adalah sebuah proses panjang yang melibatkan banyak faktor termasuk kehidupan masyarakat di sekitarnya.

Peraturan tentang konservasi terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dalam Pasal 27 Ayat 1, UU no. 5 tahun 1990 dinyatakan bahwa “Peran serta rakyat dalam konservasi diarahkan dan digerakkan oleh pemerintah melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna.” Kegiatan tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Ayat 2 yang menyatakan bahwa “dalam mengembangkan peran serta rakyat tersebut, pemerintah menumbuhkan dan meningkatkan sadar konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di kalangan rakyat melalui pendidikan dan penyuluhan.” Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi regulasi, masyarakat menjadi sebuah objek penting dalam pelaksanaan konservasi. Sayangnya, dari sisi pelaksanaannya masih sering terjadi ketidaksesuaian.

National Geographic mencatat konflik yang terjadi di sekitar kawasan konservasi sebanyak 40 persen. Akibat konflik ini terjadi pemiskinan

masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan konservasi, dimana hal ini tidak sesuai dengan tujuan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem itu sendiri yaitu mengusahakan terwujudnya sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang tentang Konservasi di atas.

Berangkat dari akar segala pengaturan mengenai sumber daya alam yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Pasal 33 Ayat 1 yang mengatakan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Dengan demikian negara, dalam hal ini pemerintah, memiliki wewenang untuk menguasai dan mengatur tentang pengelolaan sumber daya alam yang ada. Pengelolaan tersebut tidak lain tujuannya adalah untuk kemakmuran rakyat. Karena itu, setiap pengelolaan sumber daya alam termasuk hutan harus mempertimbangkan kemakmuran rakyat di dalamnya.

Konservasi merupakan sebuah proses panjang memperbaiki dan menjaga sebuah rantai kehidupan. Karenanya, konservasi harus mempertimbangkan dampaknya bagi lingkungan, juga masyarakat yang ada di sekitarnya. Agar konservasi kembali kepada pengertian dan tujuannya yakni perlindungan dan pelestarian. Manusia dan alam adalah sebuah kolaborasi yang tak dapat dipisahkan, keduanya saling menjaga dan menghidupkan. Begitulah pelaksanaan konservasi menjadi suatu bagian yang sangat berpengaruh dan berperan penting bagi banyak kehidupan.

INFORMASI LEBIH LANJUT

<https://aksaranemone.wordpress.com/2017/07/27/menempuh-jalan-panjang-konservasi/>

KIAT Guru Siapkan Strategi Keberlanjutan

“Program KIAT Guru agar terus lanjut sampai 2018. Perlu dipikirkan agar praktik yang sudah baik ini dapat diseminasi oleh Pemerintah Daerah peserta rintisan kepada sekolah-sekolah lain di desa sangat tertinggal di lima kabupaten. Pemerintah Pusat, dengan dipimpin oleh Kemdikbud, selanjutnya perlu mendiseminasikan ke 122 kabupaten PDT yang memiliki desa dengan kategori sangat tertinggal.”

Arahan ini disampaikan oleh Plt Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Hamid Muhammad, pada pembukaan Lokakarya Refleksi Nasional KIAT Guru yang diselenggarakan oleh Kemdikbud dan TNP2K di Hotel Merlynn (Jakarta, 20/10).

Kegiatan ini bertujuan untuk meninjau perkembangan selama satu tahun berjalannya program rintisan di 203 SD yang bertempat di desa sangat tertinggal di Kabupaten Ketapang, Landak, Sintang, Manggarai Barat dan Manggarai Timur. Hadir di antaranya perwakilan dari TNP2K, Kemdikbud, Kementerian dan Lembaga terkait, Pemerintah Propinsi, lima Pemerintah Kabupaten daerah rintisan, serta mitra pembangunan dari Pemerintah Australia dan Bank Dunia.

Keputusan agar program berlanjut berangkat dari adanya indikasi perubahan. Sebelum rintisan KIAT Guru, masyarakat memberikan nilai 68 dari 100 untuk tingkat kehadiran guru, dan nilai 55 dari 100 untuk kualitas layanan guru. Setelah delapan bulan berjalannya KIAT Guru, nilai kehadiran guru meningkat menjadi 91, dan nilai kualitas layanan guru meningkat menjadi 92. Sebelum rintisan KIAT Guru dimulai, 15 persen murid kelas 1 hingga 5 SD belum mengenal huruf, dan tujuh persen belum mengenal angka. Hasil tes cepat yang dilakukan oleh Kader Desa dan

Kelompok Pengguna Layanan setelah KIAT Guru berjalan delapan bulan menemukan hanya 9 persen murid yang sekarang belum mengenal huruf dan empat persen murid yang masih belum mengenal angka.

Sejumlah 122 desa rintisan KIAT Guru juga telah menganggarkan sejumlah total Rp.848,5 juta untuk mendukung operasional Kader Desa dan Kelompok Pengguna Layanan dalam melakukan penilaian bulanan terhadap layanan pendidikan bersama dengan guru di tahun 2017.

Dalam arahnya, PLT Dirjen GTK-Kemdikbud, yang juga berperan sebagai Ketua Tim Pengarah Tim Koordinasi Nasional program KIAT Guru, juga mendukung rencana pengembangan mekanisme KIAT Guru untuk daerah perkotaan yang mengaitkan pembayaran Tunjangan Profesi Guru dengan kinerja. “Tunjangan guru kita semakin tahun semakin banyak. Di tahun 2018, anggaran untuk Tunjangan Profesi adalah Rp.72 triliun. Tetapi hasil penelitian Bank Dunia menunjukkan Tunjangan Profesi sebesar satu kali gaji pokok tidak menghasilkan apa-apa. Hal ini ditunjukkan dengan rendahnya hasil belajar murid Indonesia di tes internasional seperti TIMSS dan PISA walaupun kurikulum sudah diganti dan tunjangan guru sudah diberikan.”

Peserta dari Kementerian dan Lembaga terkait, yang diwakili oleh Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur



Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pun mendukung rencana rintisan Tunjangan Profesi Guru berdasarkan kinerja yang diharapkan akan berdampak pada peningkatan hasil belajar murid. “[Kami] menyambut baik apabila kinerja guru diterapkan pada Tunjangan Profesi dan dalam mencari tools dan instrumen yang baik untuk memastikan guru mendapatkan Tunjangan Profesi sesuai dengan kinerjanya,” ujar Vivi Andriani, Kepala Subdirektorat Pendidikan Dasar dan Menengah, Kedeputan Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/ Bappenas.

Sebagai salah satu tindak lanjut dari arahan tersebut, para peserta lokakarya membahas usulan strategi keberlanjutan program rintisan KIAT Guru yang mengaitkan Tunjangan Khusus dengan kehadiran dan kualitas layanan maupun strategi pelaksanaan Tunjangan Profesi berbasis kinerja. Usulan strategi keberlanjutan menekankan agar para pemangku kepentingan dimampukan untuk melaksanakan rintisan Tunjangan Khusus berbasis kehadiran dan layanan secara mandiri, khususnya paska Juni 2018.

Di sisi lain, dibahas pula revisi dan pembuatan produk hukum pelaksanaan KIAT Guru di tingkat nasional maupun daerah untuk tahun 2018 yang memayungi keberlanjutan rintisan pengaitan Tunjangan Khusus dengan kehadiran dan kualitas layanan serta rintisan Tunjangan Profesi berbasis kinerja.

Arahan maupun tanggapan yang dihasilkan dari Lokakarya Refleksi Nasional ini pun ditindaklanjuti dalam pelatihan Tim Pelaksana TNP2K-KIAT Guru yang telah selesai dilaksanakan pada hari Kamis, 28 September lalu di Jakarta. Tim Pelaksana KIAT Guru merumuskan strategi dalam menyiapkan pemangku kepentingan daerah dapat melaksanakan kegiatan rintisan secara mandiri di tahun 2018.

Di antaranya adalah penguatan bagi Kader Desa, Kelompok Pengguna Layanan, maupun sekolah untuk terus melakukan penilaian bulanan terhadap kesepakatan layanan yang telah dibuat dengan dukungan dari Pemerintah Desa setempat. Selain itu, penguatan juga akan dilakukan pada peran Camat, UPTD/UPPK/Cabang Dinas Pendidikan maupun Dinas Pendidikan, BPMPD dan OPD terkait dalam mengkoordinasikan kegiatan yang dilakukan masing-masing aktor di tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten.

Sumber:

<http://www.tnp2k.go.id/id/artikel/kiat-guru-siapkan-strategi-keberlanjutan-rintisan-tunjangan-profesi-berbasis-kinerja-2018/>

Artikel

ADB akan Bantu Lebih dari \$1 Miliar bagi Sektor Energi Indonesia

MANILA, FILIPINA (14 September 2017) — Dewan Direktur Asian Development Bank (ADB) hari ini menyetujui dua pinjaman yang total bernilai hingga \$1,1 miliar untuk memperkuat dan mendiversifikasi sektor energi Indonesia—sektor yang dipandang penting dalam mendorong pertumbuhan yang inklusif dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Yang pertama adalah pinjaman berbasis kebijakan senilai \$500 juta (termasuk \$100 juta dari Dana Infrastruktur ASEAN atau AIF) untuk Program Energi Berkelanjutan dan Inklusif (SIEP)—Subprogram 2. Yang kedua adalah pinjaman berbasis hasil senilai \$600 juta bagi Perusahaan Listrik Negara (PLN)

<http://www.batukarinfo.com/node/34091>

Pengumpulan Data Tolok Ukur Penganggaran untuk Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus

Tujuan benchmark adalah untuk memperoleh pengukuran yang sebanding dari realisasi pengeluaran anggaran oleh Pemerintah mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak dari waktu ke waktu. Informasi benchmarking akan memberikan informasi mengenai kecukupan pengeluaran di suatu negara, memungkinkan analisis perubahan sumber daya terhadap komitmen kebijakan dan kebutuhan, serta melakukan perbandingan antar provinsi / kabupaten, dan tren dari waktu ke waktu.

<http://www.batukarinfo.com/news/pengumpulan-data-tolok-ukur-penganggaran-untuk-anak-yang-membutuhkan-perlindungan-khusus>

Referensi



Protokol Pemantauan Kesehatan Terumbu Karang

Kondisi ekosistem pesisir dan laut merupakan bagian dari aspek biofisik pengelolaan yang perlu diidentifikasi, dinilai potensinya dan dipantau (monitor) secara berkala sebagai bagian dari proses pengelolaan. Pesisir dan laut memiliki tiga ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang. Ketiga ekosistem ini memiliki fungsi penting yang saling berkaitan baik dari aspek ekologis maupun ekonomis. Secara ekologis, ketiga ekosistem ini merupakan tempat mencari makan (feeding ground).

<http://www.batukarinfo.com/referensi/protokol-pemantauan-kesehatan-terumbu-karang>



Navigating the Terrain A Toolkit for Conceptualising Service Design Projects

In working collaboratively with different partner agencies, we have found that service delivery requires a deep understanding of the enabling environment and the right people; neglecting either of these could compromise the success of the project. Factors such as culture and identity, social and political context, choosing the right stakeholders to participate in the design and delivery of the service, and maintaining the effectiveness of the team should be considered.

<http://www.batukarinfo.com/node/34121>



Kegiatan di BaKTI

23 Oktober 2017

Pertemuan Tindak Lanjut Kunjungan Belajar Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)

Dalam rangka membangun sistem perlindungan anak di Sulawesi Selatan khususnya di Kota Makassar dan kabupaten Gowa, Tim Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integratif/PPKAI Gowa dan Makassar telah melakukan upaya sungguh-sungguh melalui berbagai kegiatan agar dapat memberikan perlindungan kepada anak rentan dan beresiko. Salah satu upaya adalah melakukan Kunjungan belajar Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) ke Kabupaten Bantaeng yang telah dilaksanakan tanggal 6 September 2017 lalu. Dari kunjungan ini ada sekitar 8 hal dipelajari yang menjadi kesuksesan SLRT di Bantaeng, antara lain kerjasama – kombinasi antara SKPD, adanya peraturan yang mengikat, kepemimpinan yang kuat, melibatkan NGO dalam hal ini BAZNAS, update data secara periodik, dan alokasi budget. Sebagai tindak lanjut dari Kunjungan Belajar tersebut, pertemuan kembali diadakan di Kantor BaKTI Makassar. Tujuan pertemuan ini untuk



merefleksikan bagaimana capaian tindak lanjut tersebut – apa yang sudah dicapai, dan apa yang masih perlu dilakukan atau diperbaiki untuk mencapainya. Acara diawali dengan pengantar dan arahan dari Tim UNICEF dilanjutkan dengan presentasi hasil kunjungan belajar dan diskusi kelompok. Sebanyak 16 peserta hadir dalam kegiatan ini berasal dari unsur pemerintah kabupaten dan provinsi. Adapun output dari kegiatan ini adalah adanya Model Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu yang diselaraskan dengan PPKAI, serta Strategi penerapan SLRT yang diselaraskan dengan PPKAI tersebut.

27 Oktober 2017

Kelas Berbagi Perpustakaan BaKTI

Bertempat di halaman depan Gedung BaKTI, Kelas berbagi inspirasi kembali digelar oleh perpustakaan BaKTI dengan menghadirkan teman-teman dari Floating School Pangkep dan Ruang Baca. Dalam kegiatan ini, *the Floating School*/Sekolah Terapung berbagi tentang program pendidikan non formal yang dilakukan dengan menggunakan kapal semi tradisional. Dalam kapal sudah tersedia buku-buku, alat tulis, materi belajar, dan fasilitator yang akan berlayar ke Pulau Saugi, Satando, dan Sapuli di Kabupaten Pangkep setiap hari Minggu selama dua jam. Dengan kapal tersebut mereka berbagi ilmu dan pengetahuan serta life skill kepada anak-anak pulau antara lain workshop seni (menggambar, musik, menari, dan prakarya), media dan teknologi (fotografi, Teknik



dasar komputer, dan desain grafis), dan workshop menulis. Selain menghadirkan *the Floating School* dan Ruang Baca, kegiatan ini menghadirkan karya-karya *crafters* Makassar, *pop up library* dan pojok buku gratis. Kegiatan ini dihadiri oleh 31 orang anggota Sahabat BaKTI berasal dari kalangan komunitas dan mahasiswa.



Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial

PENULIS Adam Kuper dan Jessica Kuper

Buku ensiklopedi di selingkup ilmu-ilmu sosial ini merupakan edisi kedua yang telah mengalami perombakan besar. Hampir sembilan puluh persen entrinya sama sekali baru, ditulis ulang dengan substansi yang direvisi total. Di samping itu dimasukkan pula liputan baru seperti studi budaya, analisis wacana, ekonomi lingkungan, feminisme, gender dan seks, sejarah kedokteran, industrialisasi, media dan politik, budaya materialis, dan post modernisme. Buku jilid 2 ini dimulai dari huruf M, Machiavelli sampai World System.



Rantau dan Renungan Budayawan Indonesia tentang Pengalamannya di Prancis

PENULIS : Ramadhan K.H, dkk

Dua puluh dua budayawan Indonesia mengenang masa mereka bermukim di Prancis. Banyak di antara mereka merantau ke Prancis untuk menuntut ilmu dalam berbagai bidang – ada juga diplomat bertugas dan penyair menapak tilas – dan umumnya mereka hidup dalam kondisi yang cukup susah: uang terbatas, penguasaan bahasa belum memadai, makanan hambar, alam fikiran orang setempat tidak selalu mudah ditembus, iklim menyengat. Mereka memperoleh lebih dari pengetahuan semata: pengalaman hidup di negeri orang, karena menghadapi masyarakat asing dengan segala adat istiadatnya yang asing pula, mendorong mereka mempertanyakan latar belakang kebudayaan mereka sendiri. Maka bila merenungkan masa perantauannya, mereka seakan-akan “bercermin dari seberang”.



Jurnal Perempuan 94 “Pekerja Rumah Tangga Domestik dan Migran”

PENULIS Safira Prabawidya, dkk

Pekerja rumah tangga (PRT) memiliki peran penting bukan hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi kehidupan sosial masyarakat dan ekonomi negara. Sayangnya, peran PRT jarang diperhitungkan, meskipun sebenarnya, pekerja rumah tangga- termasuk pekerjaan merawat atau mengasuh- merupakan aktivitas yang kompleks dengan implikasi mendalam bagi kesejahteraan pribadi, sosial, dan ekonomi. Hingga perlu ada pengakuan secara hukum dan sosial bahwa pekerjaan rumah tangga yang dilakukan PRT sama penting dan bernilainya dengan pekerjaan lain di ruang publik. Karena itu pemenuhan hak-hak dasar bagi PRT yang sama dan setara dengan hak-hak pekerja lain merupakan keharusan. Selain itu perlu ada regulasi yang melindungi dan mengatur pemenuhan hak tersebut.



Bissu = Pergulatan dan Peranannya di Masyarakat Bugis

PENULIS Halilintar Lathief

Sebagai anggota masyarakat, Bissu perlu mendapat penghargaan seperti anggota masyarakat yang lain. Mereka tidak boleh diremehkan, apalagi dibasmi. Profesi sebagai Bissu juga perlu dibedakan dengan profesi calalai atau waria. Ada tiga klasifikasi waria yang dibuat oleh Bissu di Sulawesi Selatan. Masih dikenal pula beberapa seperti: guru, sala wei, dan piso sile (pisau silet), atau AC-DC “maju kena-mundur kena” untuk menyebut mereka yang bisex. Buku ini merupakan oasis di tengah kekurangan referensi mendasar tentang keberadaan Bissu masa kini. Sebagai seorang antropolog sekaligus seniman, ia akrab dengan nuansa-nuansa religi yang sulit didapatkan oleh peneliti dari latar belakang budaya yang berbeda, apalagi mereka yang tidak terlibat langsung dan secara terus-menerus di lapangan.